



**HEGEMONI KEKUASAAN PEMANGKU ADAT MINANGKABAU
DALAM NOVEL *TENGGELAMNYA KAPAL VAN DER WIJCK* KARYA
HAMKA: KAJIAN HEGEMONI GRAMSCI**

SKRIPSI

untuk memperoleh gelar Sarjana Sastra

OLEH

Nama : Nita Kartika Sari

Nim : 2111413027

Program studi : Sastra Indonesia

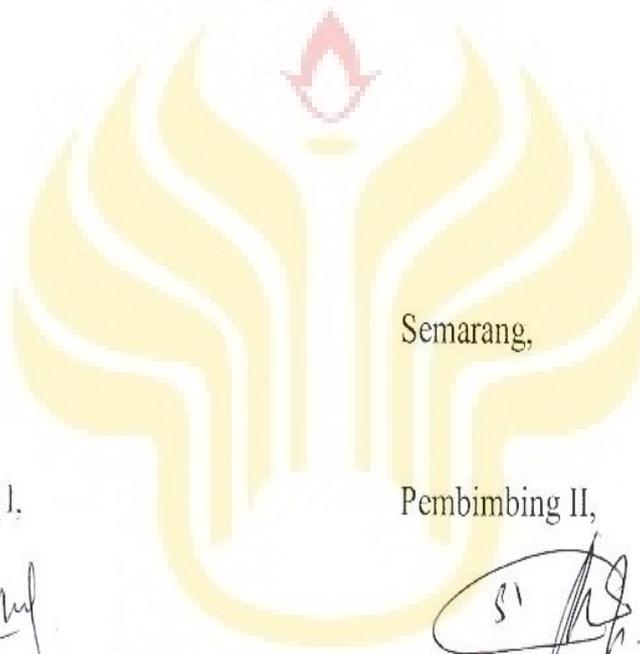
Jurusan : Bahasa dan Sastra Indonesia

**FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang.



Semarang,

Pembimbing I,

Sumartini, S.S., M.A

NIP 197307111998022001

Pembimbing II,

U'umQomariyah, S.Pd., M.Hum.

NIP 198202122006042002

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Ujian Skripsi
Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas
Negeri Semarang.

Pada Hari : Jum'at

Tanggal : 6 Oktober 2017

Panitia Ujian Skripsi

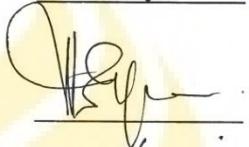
Ketua
Prof. Dr. M. Jazuli, M.Hum.
196107041988031003



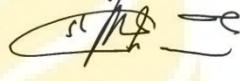
Sekretaris
Dr. Haryadi, M.Pd
196710051993031003



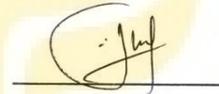
Penguji I
Mulyono, S.Pd., M.Hum.
197206162002121001



Penguji II/Pembimbing II
U'um Qomariyah, S.Pd., M.Hum.
198202122006042002



Penguji III/Pembimbing I
Sumartini, S.S., M.A
197307111998022001



Mengetahui,



Dekan Fakultas Bahasa dan Seni

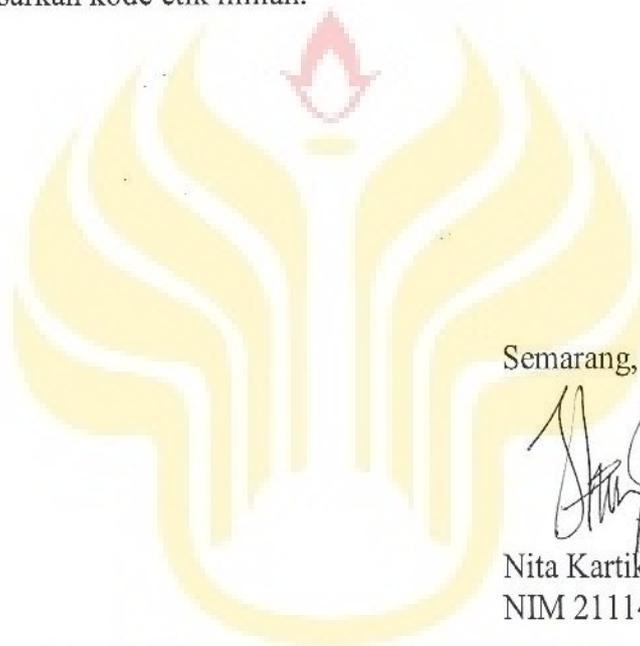
Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum.

NIP 196008031989011001

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.



Semarang, 4 Oktober 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nita Kartika Sari', is written over the logo area.

Nita Kartika Sari
NIM 2111413027

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ❖ Kebanggaan dalam hidup adalah bila kita melakukan apa yang menurut orang lain tidak mungkin kita lakukan. (Waiter Bouyen Not)
- ❖ Hidup sepatutnya diperkaya dengan persahabatan. Mencintai dan dicintai adalah kebahagiaan tak terperikan. (Sidney Smith)
- ❖ If you can dream it, you can do it. (walt Disney)

Persembahan :

1. Ibu Mardiyah dan Bapak Rasto, serta kakak dan adik saya Eka Kurnia Wati dan Faevi Nurotul Fadillah, yang tidak pernah henti-hentinya untuk mendoakan,
2. Universitas Negeri Semarang, Fakultas Bahasa dan Seni, dan Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia.

SARI

Sari, Nita Kartika. 2017. *Hegemoni Pemangku Adat Minangkabau dalam Novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck Karya Hamka*. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Sumartini. S.S., M.A. Pembimbing II: U'um Qomariyah, S.Pd., M.Hum.

Kata Kunci: hegemoni; kekuasaan; pemangku adat Minangkabau; dominasi.

Karya sastra memang tidak bisa dilepaskan begitu saja dari pengarang dan keadaan sosial yang melatarbelakangi penciptaannya serta segala gejolak kemasyarakatan yang ada seperti kekuasaan dan dominasi yang dirasa merugikan. Penelitian dengan judul *Hegemoni Kekuasaan Pemangku Adat Minangkabau dalam Novel "Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck" Karya Hamka* ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk hegemoni kekuasaan, faktor penyebab terjadinya hegemoni dan dampak yang dihasilkan dari adanya hegemoni yang dilakukan oleh pemangku adat yang ada di Minangkabau. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi sastra menggunakan teori hegemoni Antonio Gramsci yang memfokuskan pada hegemoni dan dominasi. Sumber data adalah novel *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* karya Hamka. Data diperoleh dengan teknik membaca dan mencatat. Hasil penelitian sebagai berikut. *Pertama*, terdapat dua jenis hegemoni kekuasaan yaitu hegemoni kekuasaan yang disadari dan tidak disadari. Hegemoni yang disadari memiliki empat bentuk yaitu kekerasan, penindasan, paksaan dan perampasan, sedangkan hegemoni yang tidak disadari berbentuk provokasi. *Kedua*, faktor penyebab terjadinya hegemoni tersebut yaitu adanya budaya matrilineal, kekuasaan yang diberikan oleh adat kepada pemangku adat sebagai pimpinan adat, tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan adat dan dapat merusak nama baik keluarga serta faktor usia dan pengalaman. *Ketiga*, dampak yang dihasilkan dari adanya hegemoni kekuasaan adalah adanya pembunuhan, pengusiran secara langsung dan tidak langsung, perbudakan dan perampasan hak atas kekayaan, pendidikan, gelar, serta hak asasi manusia. Melalui penelitian ini diharapkan pembaca dan peneliti lain dapat mengetahui lebih dalam mengenai budaya yang ada di Minangkabau serta wujud ketimpangan sosial yang ada dalam masyarakat. Meskipun novel karya Hamka ini tergolong ke dalam karya sastra lama namun masih ada relevansinya dengan masyarakat sekarang. Selain itu peneliti lain juga dapat melakukan penelitian terhadap novel ini dengan menggunakan pendekatan atau sudut pandang yang lain dengan membahas aspek-aspek yang ada dalam novel seperti menggunakan bidang ilmu feminis dengan mengkaji hak tokoh Hayati yang termarginalkan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan melalui proses yang panjang.

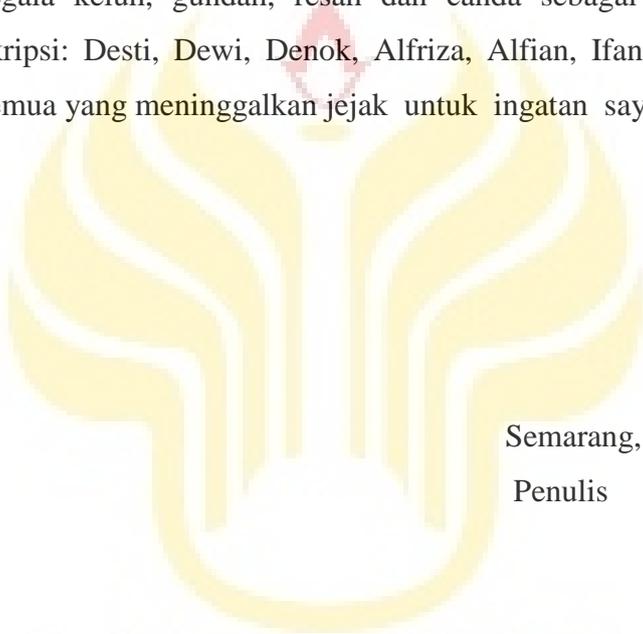
Terima kasih tak berujung atas kemurahan beliau-beliau :

- 1 Sumartini, S.S.,M.A., dosen pembimbing I yang telah sabar membantu dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi dengan sabar dan bijaksana.
- 2 U'um Qomariyah, S.Pd.,M.Hum., dosen pembimbing II yang bersedia memberikan arahan, waktu, dan kesabaran kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi.
- 3 Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia yang telah memberikan jalan dan nasihat untuk segera menyelesaikan skripsi.
- 4 Dekan Fakultas Bahasa dan Seni yang memberi kesempatan peneliti untuk belajar di Fakultas Bahasa dan Seni.
- 5 Rektor Universitas Negeri Semarang selaku pimpinan tertinggi lembaga tempat peneliti menuntut ilmu dan menyelesaikan sebagian tanggung-jawab.
- 6 Dosen-dosen Sastra Indonesia, terima kasih telah memberikan ilmu yang bersifat akademik maupun non akademik tentang kesusastraan.
- 7 Ibu dan Bapak dengan semua doa dan ridha yang ada di dalamnya. Kakak, adik dan keponakan, terima kasih untuk kalian yang tidak pernah menuntut namun dukungannya tidak pernah surut.
- 8 Bayu Gilang Pratama, Rekan; penuntun menggapai mimpi, cita dan cinta. Tempat memberi dan menerima perihal pilihan, keadaan, petualangan dan keputusan. Rekan terbaik sekaligus wadah untuk ekspedisi hidup yang menakjubkan tentang cinta-kasih antara aku, mereka dan dirimu.

- 9 Rekan sisa angkatan Sastra Indonesia 2013, khususnya Rizki, Tika, Ayu, Fitria dan Faida untuk cerita dan motivasi yang diberikan. Sampai jumpa.
- 10 Panitia PPAK FBS 2014 dan 2017 seksi Perkap dan DPM FBS sebagai tempat penulis bernaung dan belajar tentang sikap kritis, kepedulian, kerjasama, tanggung jawab, berorganisasi, dan kebersamaan.
- 11 Kalian yang senantiasa sebagai rekan-rekan yang *bawel*, teman berbagi segala keluh, gundah, resah dan canda sebagai warna rasa dari skripsi: Desti, Dewi, Denok, Alfriza, Alfian, Ifan, dan teman-teman semua yang meninggalkan jejak untuk ingatan saya.

Semarang, 6 Oktober 2017

Penulis



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
SARI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Kajian Pustaka	15
2.2 Landasan Teori	22
2.2.1 Hakikat Adat dan Pemangku Adat di Minangkabau.....	23
2.2.2 Teori Hegemoni Gramsci.....	43
2.2.2.1 Sastra dalam Prespektif Hegemoni Gramsci.....	52
2.2.2.2 Dominasi dalam Prespektif Hegemoni Gramsci.....	55
2.2.2.3 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Hegemoni Kekuasaan.....	58
2.2.2.4 Dampak dari Adanya Hegemoni Kekuasaan.....	61

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian.....	65
3.2 Data dan Sumber Data.....	65
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	66
3.4 Teknik Analisis Data.....	67

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian.....	68
4.1.1 Bentuk Hegemoni Kekuasaan Pemangku Adat	68
4.1.2 Faktor Penyebab Hegemoni Kekuasaan Pemangku Adat Minangkabau.....	70
4.1.3 Dampak Hegemoni Kekuasaan Pemangku Adat.....	72
4.2 Pembahasan.....	73
4.2.1 Bentuk Hegemoni Kekuasaan Pemangku Adat Minangkabau..	74
4.2.1.1 Hegemoni Kekuasaan Pemangku Adat yang Disadari.....	74
a. Kekerasan.....	74
b. Penindasan.....	76
c. Paksaan.....	80
d. Perampasan.....	84
4.2.1.2 Hegemoni Kekuasaan Pemangku Adat yang Tidak Disadari....	88
Provokasi.....	88
4.2.2 Faktor Penyebab Hegemoni Kekuasaan Pemangku Adat Minangkabau.....	91
4.2.2.1 Adanya Budaya Matrilineal	91
4.2.2.2 Kekusaan yang Dimiliki berdasarkan Adat.....	95
4.2.2.3 Tindakan yang Melanggar Adat dan Merusak Nama Baik Keluarga.....	97
4.2.2.4 Fakor Usia dan Pengalaman.....	99
4.2.3 Dampak Hegemoni Kekuasaan Pemangku Adat Minangkabau..	101
4.2.3.1 Pembunuhan.....	101
4.2.3.2 Pengusiran yang Disadari dan Tidak Disadari.....	102

4.2.3.3	Perbudakan.....	106
4.2.3.4	Hilangnya Hak Atas Kekayaan, Pendidikan, Gelar, Status Sosial dalam Masyarakat, dan Hak Asasi Manusia.....	108
BAB V PENUTUP		
5.1	Simpulan.....	112
5.2	Saran	113
DAFTAR PUSTAKA.....		115
LAMPIRAN		118



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Sinopsis Novel <i>Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck</i> Karya Hamka.....	119
Lampiran 2	: Biografi Pengarang	124
Lampiran 3	: Tabel Bentuk Hegemoni Kekuasaan Pemangku Adat Minangkabau dalam Novel <i>Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck</i> Karya Hamka.....	126
Lampiran 4	: Tabel Faktor Penyebab Hegemoni Kekuasaan Pemangku Adat dalam Novel <i>Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck</i> Karya Hamka.....	134
Lampiran 5	: Tabel Dampak Hegemoni Kekuasaan Pemangku Adat dalam Novel <i>Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck</i> Karya Hamka.....	137

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sastra dan masyarakat memang tidak bisa dilepaskan begitu saja dari kehidupan manusia di zaman modern seperti saat ini. Kedudukan sastra semakin meningkat dan semakin penting. Dalam perkembangannya karya sastra tidak lagi dipandang sebagai karya kreatif yang bertujuan untuk menghibur karena sifatnya yang cenderung khayal akan tetapi karya sastra ternyata mampu menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi. Hal ini membuat karya sastra tidak hanya berguna bagi pengarang tapi penting juga bagi pembaca karena dalam karya sastra terdapat pendapat-pendapat dari pengarang yang ternyata mampu mengubah pandangan pembaca mengenai suatu hal.

Sastra bisa dikatakan sebagai karya kreatif yang menggunakan manusia dan kehidupannya sebagai objek. Maka dari itu karya sastra selalu menampilkan gambaran hidup yang merupakan kenyataan sosial, termasuk bentuk ekspresi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan sosial sangat berpengaruh kuat terhadap wujud karya sastra.

Karya sastra yang lahir di tengah-tengah masyarakat merupakan sebuah hasil imajinasi dan refleksi terhadap gejala-gejala sosial yang ada di sekitar lingkungan pengarang. Dengan kata lain, karya sastra tersebut merupakan hasil dari serangkaian proses perenungan dan pengalaman pengarang dalam menghadapi dan menyelami nilai-nilai tentang kehidupan.

Karya sastra akan selalu berhubungan dengan suatu lapisan masyarakat tertentu dengan keadaan sosial budaya tertentu dalam kurun waktu dan tempat tertentu. Adanya gambaran pergerakan tentang keadaan serta situasi yang terjadi pada masa penciptaan karya sastra tersebut, baik sosial budaya, pendidikan, agama, politik, maupun ekonomi.

Karya sastra yang berhubungan dengan keadaan sosial masyarakat ataupun unsur-unsur sosial dalam masyarakat dapat dipahami melalui kajian sosiologi sastra. Kajian ini merupakan sebuah pendekatan terhadap karya sastra yang mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan dengan menggunakan analisis teks untuk mengetahui strukturnya.

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa sosiologi sastra adalah telaah yang objektif dan imanjitatif tentang manusia dalam masyarakat; telaah tentang lembaga dan proses sosial. Sosiologi mencari tahu bagaimana masyarakat dimungkinkan, bagaimana ia berlangsung dan bagaimana ia tetap ada. Dengan mempelajari lembaga-lembaga sosial, dan segala masalah perekonomian, keagamaan, politik, dan lainnya (Damono, 2010:9)

Salah satu gejala yang terdapat dalam masyarakat, yaitu adanya sebuah kesenjangan sosial dalam masyarakat itu sendiri. Terdapat beberapa perbedaan golongan, dan paham ideologi pada akhirnya akan menciptakan pertentangan yang menghasilkan kelas sosial yang kemudian berhubungan dengan sikap, serta strategi dalam mengoordinasikan kekuasaan yang dilakukan oleh organisasi atau kelompok tertentu dalam praktik kekuasaan.

Karya sastra yang berhubungan dengan manusia kolektif merupakan sesuatu yang dapat dikaji dengan sosiologi sastra. Antonio Gramsci merupakan salah satu tokoh dalam teori sosiologi sastra yang dikenal dengan pemikirannya mengenai hegemoni. Hegemoni berdasarkan pemikiran Gramsci dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan atau dominasi atas nilai-nilai kehidupan, norma, maupun kebudayaan sekelompok masyarakat yang akhirnya berubah menjadi doktrin terhadap kelompok masyarakat lainnya, sehingga kelompok yang didominasi tersebut secara sadar mengikutinya (Anwar, 2010: 83).

Adanya dominasi kekuasaan tersebut kemudian menciptakan dua kelas sosial dalam masyarakat yaitu kelas masyarakat sipil dan kelas masyarakat politis atau bisa juga disebut kaum proletar dan kaum bourjuis. Kaum masyarakat sipil (proletar) merupakan kaum yang suka rela bersifat rasional, dan tidak memaksa, sedangkan masyarakat politis (bourjuis) merupakan badan badan Negara seperti angkatan udara, kepolisian, pemilik modal, dan birokrasi pusat yang secara politis berperan sebagai penguasa dominan.

Kelas sosial dalam masyarakat terbentuk karena dalam kenyataannya kehidupan manusia pasti akan ada yang memerintah dan diperintah, baik dalam segi ekonomi, sosial, adat istiadat, maupun pendidikan. Dari berbagai faktor yang ada, segi ekonomi dianggap lebih dominan dalam pembentukan kelas sosial tersebut, hal ini dapat dilihat dari adanya pembagian kerja yang memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat.

Lebih jauh, selain pembagian kerja, kebudayaan dalam suatu masyarakat juga memegang peranan penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Budaya

berkaitan dengan cara manusia itu hidup. Secara harfiah, istilah kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta *buddhayah*, ialah bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti budi atau akal. Demikian kebudayaan itu dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Kebudayaan juga dapat diartikan sebagai keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu. (Koentjaraningrat, 1994:9).

Definisi tersebut menegaskan bahwa dalam kebudayaan mensyaratkan terjadinya proses belajar untuk mampu memunculkan ide atau gagasan dan karya yang selanjutnya menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan melalui proses belajar itu berlangsung secara terus menerus dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Masyarakat dalam satu peradaban akan menghasilkan kebudayaan yang mempengaruhi dan membentuk pola pikir, tingkah laku, kepercayaan, adat istiadat, kebiasaan, tradisi, nilai hingga mitos dalam masyarakat.

Adat istiadat merupakan salah satu dari sekian banyak kebudayaan yang ada. Masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat terus menerus, dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama (Koentjaraningrat, 2009: 115-118). Melalui adat, masyarakat menciptakan struktur sosial yang di dalamnya termasuk nilai-nilai moral, norma, tradisi, dan hukum. Kekuasaan hukum adat dipegang sepenuhnya oleh pemimpin adat, dan bertanggung jawab atas semua hal yang berhubungan dengan adat.

Setiap pemimpin pasti tidak terlepas dari sebuah kekuasaan. Untuk mempertahankan kekuasaannya terkadang seorang akan menggunakan ideologi -

ideologi sebagai sebuah pegangan untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaannya. Ideologi tersebut terbentuk dari sebuah gagasan dan opini yang di dalamnya memiliki pusat formasi, penyampaian, penyebaran, serta persuasi.

Novel *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* bukan satu-satunya karya Hamka yang memiliki latar belakang agama, sosial, dan budaya di dalamnya. Meskipun novel *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* bersifat fiktif, namun novel karangan Hamka ini memiliki nilai realis dalam artian yaitu dunia fiktif yang memberi kesan pada dunia pembaca atau merujuk pada suatu realita tertentu, seperti menghadirkan realitas yang mengangkat permasalahan dengan menonjolkan sisi budaya, moral, spiritual, dan kemanusiaan untuk menyampaikan sebuah makna yang terkandung.

Novel *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* karya Hamka dipilih sebagai objek kajian penelitian skripsi ini karena beberapa hal. Pertama, realitas yang berusaha dihadirkan pengarang dalam novel ini berupa penggambaran kondisi sosial masyarakat yang sesuai pada saat itu. Sistem kekerabatan matrilineal tergambar jelas dalam novel karangan Hamka ini. Sistem ini mengatur garis keturunan berdasarkan Ibu. Menariknya meskipun Minangkabau merupakan daerah dengan dominasi umat muslim terbesar ke dua setelah Aceh di Indonesia, akan tetapi mereka masih mempertahankan budaya matrilineal daripada patrilineal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya ajaran Islam yang memuliakan seorang ibu tiga kali daripada ayah dan tidak adanya hadist yang mengatakan kekerabatan matrilineal, namun tidak ada juga hadits yang melarangnya. Nabi SAW bersabda, Wanita dinikahi karena empat hal, karena

agama, harta, kecantikan, dan nasab (keturunannya). Maka pilihlah agamanya maka akan menguntungkan kamu. (HR Abu Dawud). Hal ini menjadi dasar kuat mengapa budaya matrilineal masih dipegang teguh masyarakat Minangkabau yang didominasi umat muslim dengan ajaran Islam yang sangat kental.

Adat Minangkabau masih memegang budaya matrilineal, yaitu suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ibu meliputi, silsilah keluarga, pengaturan ahli waris, pernikahan, dan hubungan masyarakat. Tentu adanya budaya yang dihasilkan oleh adat yang mendominasi dirasa merugikan kaum atau masyarakat bawah. (Ensiklopedia Indonesia. 1984: 2173)

Sistem kekerabatan matrilineal yang dipertahankan oleh masyarakat Minangkabau kemudian menciptakan strata sosial dalam masyarakat yang terdiri dari tiga kedudukan yaitu kaum bangsawan, biasa dan rendah. Adanya pemimpin adat atau pemangku adat bertujuan untuk tetap melestarikan adat, tradisi dan budaya dari sistem kekerabatan matrilineal tersebut. Adat yang terbentuk dari sistem kekerabatan matrilineal ini dirasa merugikan karena menciptakan kelas sosial dalam masyarakat dan pemimpin adat sebagai salah satu kelas atas tentu memiliki kekuasaan lebih dari masyarakat lainnya. Pemerintahan yang dilakukan oleh pemimpin adat didasari oleh serangkaian nilai, pandangan hidup, cita-cita, pengetahuan, keyakinan, dan aturan-aturan yang saling berkaitan sehingga membentuk satu kebudayaan leluhur sebagai nilai dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua, novel *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* karya Hamka menyuguhkan nilai-nilai agama dan budaya Minangkabau, meskipun penggambaran kebudayaan yang ditampilkan pengarang kepada pembaca masih belum pasti kebenarannya namun melalui kebudayaan tersebut kita dapat mengetahui adanya dampak positif dan negatif yang dihasilkan dari sebuah kebudayaan. Dampak positif atau kelebihannya berupa keanekaragaman budaya, namun dampak negatif atau kekurangannya dari adanya kebudayaan yang mendominasi yaitu adanya pembatas atau penghalang dalam berkreasi, hal ini tentu menjadi kerugian bagi sebagian masyarakat.

Ketiga, sejauh yang peneliti ketahui bahwa belum adanya penelitian mengenai sosiologi sastra khususnya hegemoni Gramsci terhadap novel *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* karya Hamka. Banyak penelitian mengenai sosiologi sastra khususnya teori Hegemoni Gramsci dengan menggunakan objek kajian yang berbeda. Begitu pula dengan objek novel *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* karya Hamka telah banyak diteliti menggunakan kajian ilmu atau teori yang berbeda dari peneliti. Penelitian ini lebih menitikberatkan kepada kebudayaan yang ada di Minangkabau yang kemudian menciptakan kelas sosial yang akan menghasilkan konflik antara satu kelas dengan kelas lainnya.

Peneliti menyadari bahwa sebagai novel yang berjaya pada tahun 1939 novel ini tentu telah banyak dianalisis dalam bidang ilmu dan teori tidak terlepas bidang ilmu sosiologi sastra. Begitupun dengan kebudayaan Minangkabau dengan setting waktu 1939 ketika bangsa Belanda masih menjajah Indonesia serta kebudayaan yang masih sangat kental tentu telah banyak dibahas oleh peneliti

lain dalam novel ini , akan tetapi peneliti lebih menekankan seberapa kuat budaya matrilineal yang ada di Minangkabau pada tahun tersebut. Kebudayaan ini akhirnya menjadi faktor utama terjadinya hegemoni dan dominasi yang dilakukan kelas atas terhadap kelas bawah dengan menggunakan teori hegemoni Antonio Gramsci.

Keempat, meskipun novel *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* karya Hamka tergolong ke dalam karya sastra lama namun, masih ada relevansinya dengan masyarakat sekarang sehingga novel ini sangat menarik untuk dikaji kembali oleh masyarakat pada saat ini. Novel yang menggambarkan budaya Minangkabau yang identik dengan agama Islam di dalamnya. Salah satu kasus yang terjadi pada saat ini yang dirasa sesuai dengan kasus yang digambarkan dalam novel adalah pernikahan.

Masyarakat Minangkabau dahulu sangat berpegang teguh dengan adat yang ada. Dalam sebuah pernikahan mereka tidak hanya bermodalkan percintaan semata, akan tetapi memperhatikan status sosial keluarga, pendidikan, serta harta kekayaan yang dimiliki. Hal ini karena masyarakat menganggap bahwa pernikahan sebagai penyatuan dua kekuatan keluarga untuk tetap mempertahankan kedudukan sosial keluarga dalam masyarakat. Kasus ini tidak hanya terjadi pada masa lampau akan tetapi masih terjadi dalam masyarakat modern seperti sekarang ini.

Kasus pernikahan tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Dini Rahma Oktara dalam artikelnya yang berjudul *Tradisi Malam Bainai pada Acara Perkawinan Adat Padang Pariaman di Kecamatan Rajabasa Kota Bandar*

Lampung, yang menyatakan bahwa pada zaman modern seperti sekarang ini para perantau ada yang menambah keluarga dengan cara menikah dengan sesama orang Minang atau bahkan dengan orang yang dari suku lainnya, namun dalam tradisi adat, orang Padang Pariaman tetap mempertahankan prosesi adatnya walaupun sudah tidak berada di tanah atau ranah Minangkabau (di rantau). Kita lihat saja dalam rangkaian perkawinan yang dilaksanakan masih melakukan beberapa ritual adat Minangkabau. Contohnya, pada upacara perkawinan, baik itu sebelum pernikahan seperti *manapiak/manyilau janjang*, *maminang*, *batimbang tando*, *bapingik* dan *malam bainai* (bagi calon mempelai wanita), adapun ritual adat setelah pernikahan seperti *baralek*, *balantuang kaniang*, *manjalang mintu/maanta singgang ayam/maanta nasi lamak*. Hal ini dibolehkan dengan syarat tidak bertentangan dengan agama Islam.

Selain itu, penelitian dengan mengangkat budaya Minangkabau ini tentu ada relevansinya dengan masyarakat Minangkabau karena penelitian ini menggunakan teori sosiologi. Teori ini mengagap bahwa karya sastra merupakan cerminan masyarakat, sehingga dapat menjadi salah satu contoh yang nyata terhadap gambaran kebudayaan yang ada di Minangkabau, sekaligus memberikan pengetahuan kepada masyarakat Minangkabau akan kebudayaan yang ada pada saat itu.

Terakhir, melalui karyanya pengarang berusaha menyampaikan aspirasinya terhadap wujud ketimpangan sosial dan semua fenomena sosial yang ada dalam lingkungannya. Hal ini membuat pengarang mampu menjadi pelopor pembaharuan terhadap suatu gejala kemasyarakatan yang terjadi. Melalui

karyanya pengarang memberikan kritik sosial terhadap kebudayaan yang ada. Pemikirannya mengenai keberadaan adat yang mendominasi serta dampak dari dominasi tersebut.

Seperti kita ketahui bahwa adat istiadat serta budaya yang ada di Indonesia sangatlah beragam. Masih banyak kebudayaan yang dipegang teguh oleh pemiliknya. Novel *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* merupakan pencerminan dari masyarakat desa Batipuh, Minangkabau yang masih memegang teguh adat istiadat yang ada. Novel ini menceritakan tokoh utama Zaenuddin yang berasal dari golongan kelas bawah yang mencintai putri pemangku adat, Hayati yang notabennya seorang putri dari golongan kelas atas. Perbedaan kelas inilah yang kemudian menjadi alasan tidak bisa bersatunya cinta kedua insan tersebut. Selain itu hak tokoh Zaenuddin sebagai ahli waris atas kekayaan ayahnya dirampas oleh adat karena Ia tidak memiliki ibu dari tanah Minangkabau melainkan dari Mekassar sehingga membuatnya berada pada tatanan masyarakat kelas bawah.

Ada kejanggalan dalam adat istiadat yang dirasakan oleh pengarang berupa adat istiadat yang dirasa telah menciptakan perbedaan kelas sosial dalam masyarakat. Perbedaan kelas tersebut terdiri dari kaum bawah, dan kaum atas, adanya pemimpin, dan yang dipimpin kemudian menciptakan kesenjangan sosial yang mana satu kaum lebih tinggi atau lebih dominan daripada kaum lainnya. Keadaan seperti ini dalam masyarakat bisa disebut sebagai masyarakat yang tidak lagi ideal.

Semakin besar dominasi yang ada dalam masyarakat semakin besar pula kekuasaan yang ada di dalamnya. Dalam karyanya pengarang sangat jelas menggambarkan dominasi adat yang kuat sehingga menghasilkan perbedaan kelas sosial yang diikuti dengan hegemoni kekuasaan. Suatu kelas dan anggotanya akan menjalankan kekuasaan terhadap kelas – kelas sosial di bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi. Melalui novel ini Hamka berusaha menuangkan ide serta pendapatnya terhadap gejala sosial budaya yang ada dalam masyarakat sekaligus menjadi salah satu bentuk kritik sosial atas ketimpangan sosial yang masih dianggap tidak baik.

Analisis novel *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* karya Hamka dengan aspek sosiologi serta teori Antonio Gramsci mengenai hegemoni kekuasaan sangat memungkinkan, karena novel *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* karya Hamka ini dapat menjadi contoh atas sebuah teori yang digagas oleh Antonio Gramsci. Selain itu juga dapat menjadi bukti bahwa dalam kenyataannya sebuah karya sastra tidak akan bisa dilepaskan begitu saja dari masyarakat yang melatarbelakanginya serta segala gejala kemasyarakatan yang ada seperti kekuasaan dan dominasi yang dirasa merugikan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang terkait dengan dominasi hegemoni kekuasaan dalam novel *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* karya Hamka sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk hegemoni kekuasaan yang dilakukan pemangku adat dalam novel *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* karya Hamka ?
2. Apa faktor penyebab terjadinya hegemoni kekuasaan yang ada dalam novel *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* karya Hamka ?
3. Bagaimana dampak yang dihasilkan dari adanya hegemoni kekuasaan terhadap tokoh Hayati dan Zainuddin yang ada dalam novel *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* karya Hamka ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk hegemoni kekuasaan yang ada dalam novel *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* karya Hamka.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya hegemoni kekuasaan yang ada dalam novel *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* karya Hamka.
3. Untuk mengetahui dampak yang dihasilkan dari adanya hegemoni kekuasaan yang ada dalam novel *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* karya Hamka.

1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam dunia sastra di Indonesia baik manfaat teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoretis

Sebagai bahan kajian dalam penelitian sastra dengan pendekatan hegemoni Gramsci. Selain itu dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi bagi peneliti

dalam melakukan kajian penelitian berikutnya dengan menggunakan pendekatan yang sama untuk meningkatkan kemampuan dalam mengapresiasi sebuah karya sastra.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Guru dan Dosen Bahasa dan Sastra Indonesia

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pengajar sebagai materi pembelajaran untuk siswa dan mahasiswa yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

b. Bagi Siswa dan Mahasiswa

1) Bagi Siswa

Dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra diharapkan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami dan mengapresiasi karya sastra khususnya novel *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* karya Hamka.

2) Bagi Mahasiswa

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk memahami dan menganalisis novel dalam usaha meningkatkan daya apresiasi serta dapat memberikan gambaran mengenai hegemoni kekuasaan yang terdapat dalam karya sastra dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra.

c. Bagi Peneliti lain

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sastra dengan permasalahan yang sejenis.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Sebagai salah satu karya sastra yang tergolong lama, tentu novel *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* karya Hamka telah banyak dianalisis dalam berbagai bidang ilmu dan teori. Peneliti menggunakan tinjauan pustaka untuk membandingkan, melanjutkan, dan mengembangkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai teori hegemoni Antonio Gramsci maupaun novel *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* karya Hamka. Beberapa penelitian relevan dalam penelitian ini adalah Brown (2009), Schwenz (2014), Pawestri (2015), Puspitarini (2014), Pujiya (2014), Alfianto (2017), Sudrajat & Muslimah (2014), dan Dakhra (2015).

Brown melakukan penelitian pada tahun 2009 yang berjudul *Gramsci and Hegemony* yang memfokuskan penelitiannya pada gambaran umum teori hegemoni yang dicetuskan oleh Gramsci dan sebab-sebab dibalik formulasinya. Melalui artikel yang dimuat dalam situs <http://links.org.au/node/1260>, Brown mencoba mengajak pembaca untuk dapat menelaah lebih jauh mengenai konsep hegemoni, sehingga pembaca atau peneliti dapat meneruskan dan memikirkan cara bagaimana menggunakan konsep-konsep hegemoni secara strategis dalam sebuah perjuangan kelas.

Sejalan dengan pemikiran Gramsci, Brown menganggap bahwa hegemoni adalah hal yang dilakukan bukan saja oleh kelas penguasa, faktanya hegemoni adalah proses untuk kelompok-kelompok sosial progresif, regresif, reformis, dan sebagainya meraih kekuasaan untuk memimpin, memperluas dan mempertahankan kekuasaan mereka. Jika dibandingkan dengan penelitian ini sama-sama menggunakan teori hegemoni yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci untuk mengetahui hegemoni yang dilakukan tidak hanya oleh kelas penguasa namun kelompok-kelompok sosial tertentu dalam suatu wilayah sehingga tidak hanya memahami pengertian mengenai hegemoni namun, lebih dalam mengani perjuangan suatu kelompok untuk melawan adanya hegemoni kekuasaan yang dilakukan oleh kelompok lain terhadapnya.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Schwenz pada tahun 2014 yang berjudul *Postcolonial Studies, Hegemony in Gramsci*, ia berusaha menggambarkan definisi dan gambaran yang nyata dari hegemoni. Hegemoni secara literasi berarti kepemimpinan, namun pengertian ini ditolak oleh Schwenz. Menurutnya hegemoni baik dalam kajian sosiologi maupun ilmu politik lebih sering dipahami sebagai dominasi dan pengendalian atau kontrol, bukan kepemimpinan. Hegemoni kekuasaan atau pengendalian mengacu pada sistem dominasi suatu etnis, dimana elit politik yang berkuasa mengendalikan komunitas etnis yang lebih rendah dengan sedemikian rupa, sehingga bisa mengantisipasi bentuk pemberontakan yang bisa muncul sebagai akibat dari hegemoni tersebut. Pendapatnya mengenai hegemoni juga sesuai dengan pendapat Raymond Williams dalam bukunya yang berjudul *Marxism and Literature (1977)*, yang

mneyatakan bahwa hegemoni bersifat dinamis dan tidak hanya secara pasif terwujud dan eksis sebagai bentuk dominasi. Hegemoni terus menerus diperbaharui, diciptakan ulang, dipertahankan, dimodifikasi dan sebaliknya, hegemoni juga terus menerus dilawan, dibatasi, diubah, dan ditantang oleh tekanan disekelilingnya.

Melalui penelitian yang dilakukan oleh Schwenz yang menggambarkan bentuk dan pemahaman yang berbeda mengenai hegemoni membuat peneliti menyadari adanya bentuk – bentuk lain dan pemahaman lebih dalam mengenai hegemoni. Peneliti juga sangat setuju dengan penelitian yang dilakukan oleh Schwenz mengenai teori hegemoni Antonio Gramsci. Relevansi dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama menggunakan teori Antonio Gramsci yang mengartikan hegemoni lebih dalam, bukan hanya sekedar bentuk kepemimpinan namun lebih ke dalam dominasi dan penengendalian atau kontrol yang dilakukan oleh komunitas etnis yang berkuasa.

Pawestri pada tahun 2015 melakukan penelitian dengan kajian hegemoni yang berjudul *Hegemoni Kekuasaan dalam Novel Bibir Merah Karya Achmad Munif* yang membahas tentang dominasi kekuasaan yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintahan terhadap masyarakat biasa. Fokus penelitian yang dilakukan Pawestri terletak pada formasi ideologi, bentuk hegemoni kekuasaan yang beroperasi dan elemen fiksi yang digunakan untuk merepresentasikan hegemoni kekuasaan dalam novel *Bibir Merah karya Achmad Munif*. Melalui penelitiannya, Pawestri turut menyumbangkan pemikirannya mengani

perkembangan teori sosiologi khususnya teori Hegemoni yang digagas oleh Gramsci.

Relevansi dari penelitian yang dilakukan oleh Prawestri dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti selain sama-sama menggunakan teori hegemoni Antonio Gramsci kesamaan berikutnya yaitu terletak pada bentuk dari hegemoni kekuasaan. Perbedaanya terletak pada formasi ideologi dan elemen fiksi yang digunakan untuk mempresentasikan hegemoni kekuasaan tersebut.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Puspitarini pada tahun 2014 dengan judul *Hegemoni Mitos Nyai Roro Kidul Terhadap Kekuasaan Jawa dalam Novel Sang Nyai karya Budi Sardjono*, memfokuskan pada hegemoni kekuasaan adat atau budaya jawa atas mitos Nyai Roro Kidul dalam Novel *Sang Nyai*. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra yaitu peneliti berusaha menghubungkan antara keadaan sosial masyarakat jawa dalam novel dengan masyarakat sebenarnya yang dikaji dengan teori hegemoni Antonio Gramsci. Hegemoni tersebut menggambarkan kekuasaan yang secara sadar diikuti oleh masyarakat. Permasalahan yang dimunculkan dalam penelitian tersebut adalah bentuk-bentuk hegemoni mitos Nyai Roro Kidul terhadap kekuasaan Jawa meliputi Sang Nyai sebagai ratu, Sang Nyai mendukung eksistensi raja, Sang Nyai sebagai penguasa kosmis, dan Sang Nyai dalam tradisi, serta perlawanan terhadap hegemoni mitos Nyai Roro Kidul yang terdapat dalam novel *Sang Nyai* karya Budi Sardjono.

Penelitian yang dilakukan oleh Puspitarini (2014) jika dibandingkan dengan penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaanya yaitu sama-sama menggunakan teori hegemoni Antonio Gramsci untuk menemukan bentuk-bentuk hegemoni yang dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lain. Perbedaannya terdapat pada kajian yang kedua, jika Puspitarini (2014) mengkaji mengenai perlawanan terhadap hegemoni mitos Nyai Roro Kidul yang terdapat dalam novel *Sang Nyai karya* Budi Sardjono, sedangkan dalam penelitian ini peneliti tidak mengkaji mengenai perlawanan atas adanya hegemoni, namun mengkaji faktor dan dampak dari adanya hegemoni tersebut.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Pujiya pada tahun 2014 dengan judul *Dominasi Klan Fujiwara pada Zaman Heian dalam Novel Heike Monogatari Karya Eiji Yoshikawa* yang berusaha menggambarkan dan menjelaskan pengertian serta kedudukan dominasi yang ada dalam masyarakat pada zaman Heina. Penelitiannya ini memfokuskan pada bentuk dominasi yang dilakukan oleh klan bangsawan Fujiwara untuk menguasai kehidupan di zaman Heina. Dominasi yang dilakukan oleh klan Fujiwara merupakan suatu gambaran kelompok masyarakat yang mendominasi sehingga menjadi suatu kelompok masyarakat yang kuat dan berkuasa di zaman Heina.

Penelitian ini menggunakan teori sosiologi sastra untuk menghubungkan antara keadaan sosial masyarakat dalam novel dengan masyarakat sebenarnya. Penelitian yang dilakukan oleh Pujiya jika dibandingkan dengan penelitian ini memiliki persamaan. Persamaanya adalah sama-sama menggunakan teori sosiologi untuk menunjukkan adanya dominasi antara kelompok yang satu dengan

kelompok yang lainnya. Sedangkan objek yang digunakan dalam penelitian Fujiya (2014) berbeda dengan objek yang digunakan peneliti.

Penelitian yang relevan juga dilakukan oleh Alfianto pada tahun 2017 dengan judul *Dominasi Sosial dalam Novel Max Havelaar Karya Multatuli :Kajian Dominasi Simbolik Pierre Bourdieu* yang membahas mengenai adanya dominasi sosial pada masa penjajahan yang dilakukan oleh Belanda kepada Indonesia. Melalui pendekatan sosiologi Pierre Bourdieu, Alfianto mencoba mencari mengungkap modal apa saja yang didapatkan oleh kelas penguasa dalam menjalankan dominasinya, dengan begitu Ia dapat menyebutkan kelas-kelas yang terbentuk akibat dominasi tersebut dalam novel.

Lebih dalam Alfianto membahas mengenai bentuk habitus dan bentuk kekuasaan atau kekerasan simbolik yang terjadi akibat adanya dominasi *Max Havelaar* Karya Multatuli. Adapun persamaanya dengan penelitian ini yaitu selain membahas mengenai adanya dominasi namun juga faktor pendukung terjadinya dominasi serta dampak yang dihasilkan dari adanya dominasi tersebut.

Penelitian lain yang juga relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sudrajat & Muslimah (2014) dengan judul *Nilai Pendidikan dalam Novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck Karya Hamka Sebuah Analisis Unsur Tema, Tokoh, Perwatakan, Amanat*. Penelitian ini menggunakan teori struktural yang membongkar lebih dalam unsur intisik dari novel *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* karya Hamka tersebut.

Sudrajat & Muslimah (2014) memfokus penelitiannya pada analisis terhadap unsur pendidikan atas tema, tokoh, perwatakan dan amanat yang terdapat dalam novel *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* karya Hamka. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sudrajat & Muslimah (2014) dengan penelitian ini adalah objek kajian yang digunakan sama-sama menggunakan novel *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* Karya Hamka, sedangkan perbedaannya terdapat pada teori yang digunakan oleh Sudrajat & Muslilah dengan teori yang digunakan oleh peneliti.

Pada tahun 2015 Dakhra juga melakukan penelitian yang menggunakan objek kajian novel *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* Karya Hamka dengan judul *Persepsi Mahasiswa Universitas Bakrie (Non Minang) Terhadap Budaya Minang Dalam Film Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* dengan menggunakan pendekatan resepsi sastra. Penelitian Dakhra mengungkapkan tentang respon penonton, khususnya Mahasiswa Universitas Bakrie yang bukan berlatarbelakang Budaya Minang terhadap Budaya Minang setelah menonton Film *Tenggelamnya Kapal Van der Wijck* yang merupakan adaptasi dari novel *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* Karya Hamka.

Melalui penelitiannya Dakhra menunjukkan respon mahasiswa Universitas Bakrie khususnya yang bukan berasal dari Budaya Minang meresepsikan Budaya Minang sebagai budaya yang memegang teguh prinsip yang dimilikinya terlebih prinsip pernikahan, serta terkesan rasis dan mendiskriminasi budaya lain. Penelitian yang dilakukan oleh Dakhra jika dibandingkan dengan penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama

menggunakan objek kajian novel *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* Karya Hamka.

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang hegemoni dan dominasi telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, begitupun dengan objek kajian novel *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck karya Hamka* telah banyak diteliti oleh peneliti lain, tetapi pada setiap penelitian memiliki perbedaan masing-masing. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini memiliki perbedaan yang terletak pada faktor terjadinya hegemoni kekuasaan dan dampak yang ditimbulkan oleh adanya hegemoni kekuasaan karena dominasi adat tersebut. Sedangkan persamaannya berupa bentuk hegemoni kekuasaan, teori hegemoni Gramsci dan objek novel *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck karya Hamka*.

Penelitian-penelitian tersebut memberikan relevansi bagi penelitian ini yaitu hegemoni kekuasaan dan dominasi sebagai bahan acuan dan pertimbangan mengenai masalah-masalah yang dikaji serta pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut. Selain itu penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk melihat seberapa jauh perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini.

2.2 Landasan Teori

Selain kajian pustaka, teori juga dibutuhkan untuk mendukung penelitian pada bab ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sosiologi dari Antonio Gramsci yang menekankan pada hegemoni serta hakikat adat dan pemangku adat di Minangkabau. Landasan teori ini dibutuhkan untuk membantu

peneliti menelaah objek penelitian dengan teori yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Landasan teori juga dibutuhkan peneliti untuk memperoleh abstraksi atau informasi tentang penelitian sejenis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sebagai sumber data sekunder, dan untuk memperoleh metode atau pendekatan pemecahan masalah yang digunakan.

2.2.1 Hakikat Adat dan Pemangku Adat di Minangkabau

Secara etimologi, adat berasal dari bahasa Arab yang berarti “kebiasaan”, atau bisa dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi suatu kebiasaan yang tetap dan dihormati, maka kebiasaan itu menjadi sebuah kebudayaan. Koentjaraningrat (1989: 187) mengemukakan bahwa kata ‘adat’ dalam bahasa Indonesia adalah kata yang sepadan untuk menggambarkan wujud kebudayaan pertama yang berupa ide atau gagasan ini. Sedangkan untuk bentuk jamaknya disebut dengan adat istiadat.

Adat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat penduduknya. Dengan demikian unsur-unsur terciptanya adat ialah adanya tingkah laku seseorang, dilakukan terus-menerus, adanya dimensi waktu dan diikuti oleh orang lain/masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Koentjaraningrat (2009: 115) yang menyatakan bahwa masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat terus menerus dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

Pemahaman mengenai adat istiadat memang luas mengingat banyaknya adat istiadat yang ada di tiap-tiap masyarakat atau bangsa dengan perbedaannya

masing-masing. Adat istiadat dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan merupakan suatu kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa tersebut. Adat istiadat biasanya bersifat mengikat, hal ini sejalan dengan pemikiran Soekanto (2011: 73) yang menyatakan bahwa “adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat, kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat “atau bagian masyarakat” yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilannya.

Ikatan tersebut terbentuk karena adat istiadat masih dipegang teguh oleh penganutnya sehingga norma dan kaidah yang ada di dalamnya dipatuhi dan dijaga karena dianggap sakral dan menghasilkan keterikatan antara individu dengan adat tersebut. Tradisi yang dianggap sakral tersebut dipertahankan dan dilaksanakan berdasarkan norma-norma adat yang berlaku. Hal ini menunjukan bahwa keberadaan adat dalam kebudayaan dan kehidupan masyarakat tidak bisa lepaskan hingga saat ini karena sifatnya yang mengikat dan mengatur pola perilaku serta kehidupan masyarakatnya.

Adat ialah kaidah-kaidah sosial yang tradisional yang sakral ini berarti bahwa ialah ketentuan leluhur dan ditaati secara turun temurun. Ia merupakan tradisi yang mengatur masyarakat penduduk asli Indonesia yang dirasakan oleh anggota-anggotanya sangat mengikat. Sebagai kaidah-kaidah sosial yang dianggap sakral, maka pelaksanaan adat ini hendaknya dilaksanakan berdasarkan norma-norma adat yang berlaku disetiap daerah dengan tanpa memperhatikan adanya stratifikasi dalam kehidupan masyarakat. (Syah dalam Ibrahim, 2009:5)

Lebih jauh M. Nasroen (dalam Soekanto, 1981:70) menjelaskan bahwa adat istiadat merupakan suatu sistem pandangan hidup yang kekal, segar serta aktual oleh karena didasarkan pada:

- a) Ketentuan-ketentuan yang terdapat pada alam yang nyata dan juga pada nilai positif, teladan baik serta keadaan yang berkembang.
- b) Kebersamaan dalam arti, seseorang untuk kepentingan bersama dan kepentingan bersama untuk seseorang.
- c) Kemakmuran yang merata.
- d) Pertimbangan pertentangan yakni pertentangan dihadapi secara nyata dengan mufakat berdasarkan alur dan kepatutan.
- e) Meletakkan sesuatu pada tempatnya dan menempuh jalan tengah.
- f) Menyesuaikan diri dengan kenyataan.
- g) Segala sesuatunya berguna menurut tempat, waktu dan keadaan.

Dalam pandangan Koentjaraningrat (1989:138) masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kolektif dimana manusia itu bergaul dan berinteraksi. Interaksi antar individu dengan keinginan dan tujuan yang sama tersebut pada akhirnya melahirkan kebudayaan. Masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain, sementara kebudayaan adalah suatu sistem norma dan nilai yang terorganisasi yang menjadi pegangan bagi masyarakat tersebut. Melalui kebudayaan, manusia menciptakan tatanan kehidupan yang ideal di muka bumi.

Secara harfiah, istilah kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta *buddhayah*, ialah bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti budi atau akal. Demikian kebudayaan itu dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Kebudayaan juga dapat diartikan sebagai keseluruhan gagasan dan karya

manusia yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu. (Koentjaraningrat, 1994:9). Definisi tersebut menegaskan bahwa dalam kebudayaan mensyaratkan terjadinya proses belajar untuk mampu memunculkan ide atau gagasan dan karya yang selanjutnya menjadi kebiasaan. Pembiasaan yang dilakukan melalui proses belajar itu berlangsung secara terus menerus dari satu generasi kepada generasi berikutnya.

Ada tiga wujud kebudayaan menurut Koentjaraningrat (1990: 186-187), yaitu:

- 1) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Wujud ini berbentuk abstrak, sehingga tidak dapat dilihat dengan indera penglihatan. Wujud ini terdapat di dalam pikiran masyarakat. Ide atau gagasan banyak hidup bersama dengan masyarakat. Gagasan itu selalu berkaitan dan tidak bisa lepas antara yang satu dengan yang lainnya. Keterkaitan antara setiap gagasan ini disebut sistem.
- 2) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktifitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud ini juga lebih sering disebut dengan sistem sosial. Sistem ini merupakan keseluruhan aktifitas manusia atau segala bentuk tindakan manusia yang berinteraksi dengan manusia lainnya. Aktifitas ini dilakukan setiap waktu dan membentuk pola-pola tertentu berdasarkan adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Tindakan-tindakan yang memiliki pola tersebut disebut sebagai sistem

sosial oleh Koentjaraningrat. Sistem sosial berbentuk kongkrit karena bisa dilihat pola-pola tindakannya dengan indra penglihatan.

- 3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia atau bisa juga disebut sebagai kebudayaan fisik. Wujud kebudayaan ini bersifat konkret karena merupakan benda-benda dari segala hasil ciptaan, karya, tindakan, aktivitas, atau perbuatan manusia dalam masyarakat.

Tiga wujud kebudayaan yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat (1990: 9) di dalamnya memiliki tujuh unsur kebudayaan yang disebut sebagai unsur kebudayaan universal karena selalu ada pada setiap masyarakat. Ketujuh unsur kebudayaan universal tersebut, yaitu :

- 1) Sistem Bahasa
- 2) Sistem Pengetahuan
- 3) Sistem Kekerabatan dan Organisasi Sosial
- 4) Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi
- 5) Sistem Ekonomi/ Mata Pencarian Hidup
- 6) Sistem Religi
- 7) Kesenian

Setiap daerah memiliki kebudayaan berupa tradisi dari adat-istiadat yang berbeda-beda, begitu pula dengan salah satu kebudayaan yang ada di Minangkabau, Sumatra Barat. Adat yang ada di Minangkabau merupakan salah satu adat yang diberikan secara turun temurun dan masih dijaga serta dipegang teguh oleh masyarakat pengikutnya.

Dari tujuh unsur kebudayaan universal yang disebutkan oleh Koentjaraningrat, terdapat tiga unsur kebudayaan yang sangat berpengaruh dalam pembentukan budaya yang ada di Minangkabau, yaitu mata pencaharian, sistem kekerabatan dan religi atau agama. Pertama, sistem mata pencaharian yang merupakan cara yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai kegiatan sehari-hari guna usaha pemenuhan kehidupan, dan menjadi pokok penghidupan baginya (Koentjaraningrat, 1994: 98). Mata pencaharian yang ada di Minangkabau didominasi dengan pertanian dan industri. Sebagian masyarakat khususnya laki-laki usia produktif lebih memilih untuk merantau atau pergi ke kota lain untuk mencari rezeki. Hal ini tergambar dalam fenomena merantau orang Minangkabau yang menggambarkan bahwa mereka merantau dalam rangka mengemban misi budaya bagi *nagari* dan kampungnya, dengan beragam motif seperti mendewasakan diri, ekonomi, sosial, politik (Naim, 1982 :43). Budaya merantau juga dilakukan sebagai suatu mobilitas sosial yang berguna sebagai media untuk menaikkan marwah laki-laki, sebab belum dapat dikatakan dewasa seorang laki-laki selagi belum merantau.

Kedua, sistem kemasyarakatan atau kekerabatan. Kehidupan keluarga manusia diatur oleh kompleks yang besar dari bermacam adat istiadat dan hukum-hukum yang tidak ditentukan oleh nalurnya secara biologis, tetapi oleh kebudayaan. Adapun aneka-aneka bentuk sistem kekeluargaan dan kekerabatan manusia (Koentjaraningrat, 1994: 88). Sistem kekerabatan atau silsilah yang ada dalam masyarakat Minangkabau diorganisasikan dengan sistem kekerabatan matrilineal. Sistem matrilineal yaitu susunan kekerabatan garis keturunan

ditentukan berdasarkan garis ibu (Ensiklopedia Indonesia, 1984: 2173). Sistem ini mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan kekerabatan dalam garis ibu. Seorang anak laki-laki atau perempuan dalam keluarga merupakan bagian garis keturunan/klan yang dibawa oleh darah ibu mereka. Sutan Takdir Alisyahbana (1983:20) melihat ciri utama dari masyarakat Minangkabau adalah adanya keterikatan orang Minangkabau pada ibunya dan rumah serta pusaka keturunan ibunya. Kehidupan perasaannya berputar sekitar rumah ibunya, sedangkan perhubungan perasaan dengan ayahnya sangat dangkal. Pendapat itu memperlihatkan bahwa seseorang itu lebih ditegaskan sebagai anak seorang ibu dan seolah-olah mengingkari bahwa seseorang itu anak dari ayahnya

Berdasarkan azas tersebut, kelompok kekerabatan yang terdapat dalam *Nagari* telah dibagi dalam beberapa tingkatan, yang berbeda antara *Nagari* yang satu dengan yang *Nagari* lain. Menurut Iva Ariani dalam artikelnya yang berjudul *Masyarakat Kebudayaan dan Politik* yang dimuat dalam jurnal *Filsafat, Vol. 25, No. 1, Februari 2015* menyatakan bahwa kekerabatan di Minangkabau terdiri dari dua bentuk yaitu, kekerabatan dalam suku, terjadi karena sistem matrilineal yang dianut orang Minangkabau seperti, ibu – anak, *mamak* – *kamanakan*, dan sebagainya. Kekerabatan luar suku, terjadi karena adanya perkawinan seperti, *sumando* – *pasumandan*, *minantu* – *mintuo*, *induk bako* – *anak pisang*, dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan pendapat Koentjaraningrat (1990; 113) bahwa keluarga-keluarga inti seperti terurai di atas

itu merupakan suatu kesatuan manusia yang di dalam ilmu antropologi dan sosiologi disebut *kingroup* atau kelompok kekerabatan.

Sistem kekerabatan dari garis ibu yang terdapat di Minang ini sangatlah kuat dan mampu mempengaruhi semua bentuk kehidupan yang ada di Minangkabau hal ini karena sistem kekerabatan berhubungan dengan kerabat tersebut menjadi poros dari berbagai interaksi, kewajiban-kewajiban, loyalitas, dan sentiment-sentimen. Artinya sistem kekerabatan ini sangat erat dengan struktur sosial yang dibangun lebih lanjut. Hal ini sejalan dengan pendapat Peggy Reeves Sanday (1998: 55) bahwa perempuan Minangkabau memiliki kekuasaan. Menurutnya, dalam hubungan sosial di desa perempuan sama dengan “titik pusat dari satu jaringan”. Perempuan senior diasosiasikan dengan tiang utama dari rumah gadang, dikatakan tiang utama karena pertama didirikan. Sanday juga menjelaskan bahwa matriarki dalam masyarakat Minangkabau adalah tentang perempuan sebagai pusat asal usul, dan dasar tidak hanya dari kehidupan tetapi juga tatanan sosial.

Irfan Teguh Prima menambahkan dalam artikelnya (<http://www.beastudiindonesia.net>) karakteristik dari sistem kekerabatan matrilineal dalam kebudayaan Minangkabau adalah sebagai berikut:

- a. Keturunan diurutkan berdasarkan garis darah ibu, seorang Minangkabau akan masuk ke dalam suku ibunya berasal.
- b. Suku terbentuk menurut garis ibu. Seorang laki-laki di Minangkabau tidak bisa mewariskan sukunya kepada anaknya. Jadi jika tidak ada anak

perempuan dalam satu suku maka dapat dikatakan bahwa suku itu telah punah.

- c. Tiap orang diharuskan menikah dengan orang luar sukunya namun tidak di luar daerah Minangkabau atau dikenal sebagai sistem eksogami. Menurut aturan adat Minangkabau seseorang tidak dapat menikah dengan seseorang yang berasal dari suku yang sama maupun menikah dengan seseorang diluar daerah Minang. Apabila hal itu terjadi maka ia dapat dikenakan hukum ada, seperti dikucilkan dalam pergaulan.
- d. Meskipun perempuan memegang seluruh kekayaan keluarga, pihak yang sebenarnya berkuasa dalam penentuan keputusan hal dalam keseharian dan lingkungan adalah saudara laki-laki tertua dalam keluarga tersebut, yang disebut sebagai *mamak*. Yang menjalankan kekuasaan di Minangkabau adalah laki-laki, sedangkan kaum perempuan di Minangkabau di posisikan sebagai pengikat, pemelihara, dan penyimpan harta pusaka.
- e. Perkawinan bersifat matrilineal, yaitu suami mengunjungi rumah istrinya.
- f. Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh *mamak* kepada kemenakannya dan dari saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudara perempuan.
- g. Setiap suku dipimpin oleh seorang pengulu atau dikenal dengan pemangku adat. Setiap pengulu memiliki pangkat atau gelar *sako* yang dipanggil dengan *Datuak*. Ia bertugas memimpin kaumnya yaitu orang-orang yang sesuku dengannya, dalam kaum itu terdapat lagi organisasi yang lebih kecil yaitu rumah. Rumah dipimpin oleh seorang *mamak* yang disebut

dengan *tungganai*. Jadi pengulu pada hakikatnya memimpin beberapa *tungganai*.

Terakhir yaitu Religi atau agama yaitu semua aktivitas manusia yang berkaitan dengan kepercayaan atau agama didasarkan pada suatu getaran jiwa, yang disebut emosi keagamaan (religius emotion). Emosi keagamaan inilah yang membuat manusia melakukan tindakan yang bersifat keagamaan (Koentjaraningrat, 1994: 132). Selain kekayaan adat dan budaya yang ada Budaya Minangkabau juga sarat dengan budaya dan ajaran muslim sehingga nilai-nilai kultural religius banyak mempengaruhi pola berpikir masyarakat Minangkabau. Dalam artikelnya yang berjudul *Masyarakat Kebudayaan dan Politik* yang dimuat dalam *Jurnal Filsafat, Vol. 25, No. 1, Februari* Iva Ariani menyatakan bahwa meskipun masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal namun mereka tetap mempertahankan ajaran Islam dalam setiap adat, kebudayaan, tradisi dan pola kehidupan lainnya. Masyarakat Minangkabau dikenal sebagai penganut ajaran Islam terbesar kedua di Indonesia setelah Aceh sehingga tentu mayoritas penduduknya merupakan muslim yang taat akan ajaran Islam. Sebagian masyarakat dunia khususnya Indonesia memang lebih mengenal bahwa umat muslim akan menerapkan sistem patrilineal dalam sistem kekerabatannya akan tetapi berberbeda dengan masyarakat Minangkabau meskipun merupakan penduduk muslim terbesar kedua di Indonesia mereka menerapkan sistem matrilineal dalam sistem kekerabatannya.

Ayah dalam keluarga inti tidak dapat memasukkan anaknya ke dalam sukunya sebagaimana yang berlaku dalam sistem patrilineal yang dianut oleh

mayoritas suku lainnya di Indonesia. Dengan kata lain seorang anak yang terlahir dengan latar belakang orang tua Minangkabau akan mengikuti suku ibunya. Alasan itulah yang mungkin menyebabkan masyarakat Minangkabau diklasifikasikan ke dalam masyarakat yang bersistem matrilineal (Muhardi, 1989:18).

Pro dan kontra tentu terjadi dalam masyarakat di luar Minangkabau, tetapi penerapan sistem matrilineal ini tidak tanpa alasan. seperti yang diutarakan oleh Iva Ariani dalam artikelnya yang berjudul *Masyarakat Kebudayaan dan Politik* bahwa sistem kekerabatan matrilineal ini masih dijaga dan diterapkan hingga saat ini karena beberapa alasan yaitu: masyarakat Minangkabau menganggap bahwa Keturunan menurut garis ibu adalah pasti dan murni hanya dari seorang ibu dapat dibuktikan ia melahirkan seorang anak, sedangkan dari bapak tidak ada saksinya. Selain itu masyarakat Minangkabau menganggap bahwa sistem matrilineal merupakan penjabaran ajaran syarak *Hablumminanas*, dan merupakan formulasi untuk menyikapi fitrah Allah Swt yang menjadikan manusia berkelompok-kelompok dan berbangsa- bangsa.

Lebih jauh dalam ajaran Islam memang tidak ada hadits yang mengatakan kekerabatan matrilineal, namun tidak ada juga hadits yang melarangnya. Bahkan, Nabi justru menyuruh menghormati ibu tiga kali lebih dari ayah. Hal ini tertuang dalam hadits bahwa surga itu terletak di bawah kaki Ibu, Menghormati ibu tiga kali. *Ummuka, Ummuka, Ummuka baru Abuka*. Nabi SAW bersabda, Wanita dinikahi karena empat hal, karena agama, harta, kecantikan, dan nasab (keturunannya). Maka pilihlah agamanya maka akan

menguntungkan kamu. (HR Abu Dawud). Menurut ajaran Islam, kedudukan wanita sama dengan pria dalam pandangan Allah (QS Al-Ahzab: 35, Muhammad: 19). Persamaan ini jelas dalam kesempatan beriman, beramal saleh atau beribadah (shalat, zakat, berpuasa, berhaji) dan sebagainya. Oleh karena itu, lahirlah sebuah kompromi dari sistem matrilineal dan syariat Islam, bahwa generasi Minangkabau yang dilahirkan senantiasa bernasab ayahnya dan bersuku ibunya.

Selain itu masih dijaganya budaya ini semata-mata karena posisi kaum perempuan dalam masyarakat Minangkabau mempunyai kedudukan yang sangat ditinggikan. Kaum perempuan Minangkabau juga digambarkan sebagai penghias *nagari* (kampung). Penempatan kaum perempuan ini bukan sekedar simbol, tetapi mereka diberi peran sesuai dengan posisinya tersebut. Oleh sebab itu, kaum perempuan dalam adat, punya tempat dalam pengambilan keputusan pada setiap musyawarah yang diadakan dalam *nagari*, meskipun dia bukan orang yang berperan dalam pengambilan keputusan (Suluah, 2004:54).

Penerapan sistem matrilineal di Minangkabau bisa saja berbeda dalam beberapa aspek di beberapa wilayah lainnya di dunia. Selain gelar yang diterima oleh anak berasal dari garis keturunan ibu bukan ayah, sistem ini juga menunjukan bahwa harta pusaka di Minangkabau diturunkan melalui garis ibu, yang berhak menerimanya adalah anggota keluarga yang perempuan anggota keluarga yang laki-laki dari sebuah keluarga matrilineal sebenarnya tidak berhak menerima harta pusaka. Mereka hanya berkewajiban untuk menjaga harta pusaka itu agar tidak

hilang dan mengusahakannya agar bermanfaat bagi kaum kerabatnya (Junus, 1976:253)

Lebih jauh menurut A. Moeis Pandito (1993:4) semenjak masuknya Islam ke dalam adat Minangkabau, maka adat Minang dengan berdasarkan sistem matrilineal di bagi menjadi empat tingkatan, yaitu:

1. *Adaik nan sabana Adaik* (Adat yang sebenarnya adat)

Adat ini merupakan adat yang paling utama yang tidak dapat dirubah sampai kapanpun karena merupakan harga mati bagi seluruh masyarakat Minangkabau karena dalam adat ini memiliki prinsip bahwa seorang Minang wajib beragama Islam dan akan hilang Minangnya kalau keluar dari agama Islam.

2. *Adaik nan diadaikkan* (adat yang di adatkan)

Adat ini adalah sebuah aturan yang telah disepakati dan diundangkan dalam tatanan Adat Minangkabau dari zaman dulu melalui sebuah pengkajian dan penelitian yang amat dalam serta sempurna oleh para nenek moyang orang Minang. Perinsip utama yang ada dalam adat yang diadatkan ini terletak pada kewajiban untuk memakai kekerabatan *Matrilineal* yaitu mengambil pesukuan dari garis ibu dan nasab keturunan dari ayah. Sehingga terbentuklah adanya *Dunsanak* (persaudaraan dari keluarga ibu) dan adanya *Bako* (persaudaraan dari keluarga ayah), serta memilih atau menetapkan *Penguhulu suku* dan *Ninil mamak* dari garis persaudaraan *badunsanak*.

3. *Adaik nan Taradaik* (adat yang teradat)

Adat ini berupa ragam budaya di beberapa daerah di Minangkabau yang berbeda-beda disetiap tempatnya, adat ini juga disebut dalam istilah *Adaik salingka nagari* (adat selinkar daerah). Adat ini mengatur tatanan hidup bermasyarakat dalam suatu nagari dan interaksi antara satu suku dan suku lainnya dalam nagari itu yang disesuaikan dengan kultur didaerah itu sendiri, namun tetap harus mengacu kepada ajaran agama Islam.

4. *Adaik Istiadaik* (Adat istiadat)

Adat ini merupakan ragam adat dalam pelaksanaan silaturahmi, berkomunikasi, berintegrasi, bersosialisasi dalam masyarakat suatu nagari di Minangkabau seperti acara pinang meminang, pesta perkawinan. Adat ini berbeda-beda disetiap wilayah, namun tetap harus mengacu kepada ajaran agama Islam.

Hukum adat *Adaik nan sabana Adaik* (Adat yang sebenarnya adat) dan *Adaik nan diadaikkan* (adat yang di adatkan) adalah wajib sehingga harus dilakukan oleh seluruh suku dan nagari di Minangkabau. Kedua adat ini dianggap sebagai suatu adat yang *Nan inadak lakang dek paneh nan indak lapuak dek hujan, dibubui indaknyo layua dianjak indaknyo mati* yang berarti adat yang tidak lekang terkena panas dan tidak lapuk terkena hujan, tidak layu jika dipindahkan dan tidak mati ketika dicabut. Kedua adat tersebut terbentuk dari hasil musyawarah yang dilakukan oleh tokoh agama, tokoh adat dan *cadiak pandai* di daerah Minangkabau.

Kedua adat terakhir yaitu *Adaik nan Taradaik* (adat yang teradat) dan *Adaik Istiadaik* (Adat istiadat) disebut *Adaik nan babuhua sintak*, artinya adat yang tidak diikat mati. Hal ini berarti kedua adat tersebut dapat diubah kapan saja namun tetap melalui kesepakatan *Panghulu Ninil mamak*, Alim Ulama, *Cerdik pandai*, *Bundo kanduang* dan pemuda yang disesuaikan dengan perkembangan zaman namun acuannya adalah sepanjang tidak melanggar ajaran Adat dan ajaran Agama Islam.

Untuk tetap menjaga keberlangsungan tradisi dari adat istiadat tersebut maka diperlukan adanya seorang pemimpin yang dianggap memahami kaidah, nilai dan norma dari tradisi yang telah diwariskan secara turun temurun tersebut. Pemimpin adat atau lebih dikenal sebagai pemangku adat berasal dari kata pemangku yang artinya memangku. Pemangku adat adalah orang yang memangku atau menjaga sesuatu.

Pimpinan dalam masyarakat dapat merupakan suatu kedudukan sosial, tetapi juga suatu proses sosial. Pimpinan memerlukan tiga unsur penting untuk dapat menjalankan kewajibannya, yaitu, kekuasaan atau *power*, kewibawaan atau *authority*, dan popularitas (Koentjaraningrat, 1994: 1991-192). Sistem pengendalian sosial: berupa adat, yang dalam prakteknya berupa cita-cita, norma, pendirian, kepercayaan, sikap, aturan-aturan, hukum, undang-undang dan lain sebagainya. Pendapat tersebut menunjukan bahwa pengertian pemangku adat adalah orang yang memiliki wewenang atas hak dan kewajiban dalam memegang adat istiadat tertentu dalam satu daerah.

Pemimpin atau pemangku adat di Minangkabau adalah orang yang didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting (*didahulukan selangkah, ditinggikan sarantiang*). Maksudnya, didahulukan selangkah adalah agar ada jarak dengan yang dipimpinnya. Ditinggikan seranting adalah agar jangan ada pemisah antara pemimpin dengan yang dipimpinnya. Jadi, pemimpin di Minangkabau selalu dekat dengan yang dipimpinnya. (<http://www.kabaranah.com>).

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa posisi pemimpin adat dalam masyarakat sangatlah tinggi karena ia memiliki tanggung jawab terhadap kaumnya. Seorang pemimpin adat di Minangkabau merupakan anggota dari kaumnya sendiri yang kemudian dipilih berdasarkan kesepakatan bersama, dan memiliki kewajiban tidak hanya untuk semua kaumnya namun untuk orang yang mengangkatnya juga.

Lebih jauh Nuwarni menyatakan dalam jurnalnya *Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik Tahun 25, Nomor 2: 108-116* bahwa di Minangkabau terdapat tiga pemimpin adat, yaitu *panghulu*, *cadiak pandai* dan alim ulama ketiga pemimpin adat tersebut sering disebut *Tungku tigo sajarangan*.

a. *Panghulu*

Pangulu berasal dari kata *Pangka* dan *Hulu* (*pangkal* dan *hulu*) *Pangkal* artinya tampuk atau tangkai yang akan jadi pegangan, sedangkan *hulu* artinya asal atau tempat awal keluar atau terbitnya sesuatu, maka *pangulu* di Minangkabau artinya yang memegang tampuk tangkai yang akan

menjadi pengendali pengarah pengawas pelindung terhadap anak kemenakan serta tempat keluarnya sebuah aturan dan keputusan yang dibutuhkan oleh masyarakat anak kemenakan yang dipimpin pangulu, *Tampuak tangkai didalam suku nan mahitam mamutiahkan tibo dibiang kamancabiak tibo digantaiang kamamutuih*

b. Alim Ulama

Alim Ulama di Minangkabau disebut dengan *suluah bendang dalam nagari* yang memiliki arti suluh terang dalam *negeri*. Dia berasal dari anggota masyarakat yang menguasai ilmu-ilmu agama Islam. Alim ulama bertugas untuk membimbing masyarakat, mendidik anak-anak, mengarahkan kaumnya ke jalan yang benar, memimpin upacara perkawinan, kematian, upacara keagamaan, menjadi imam –khatib, serta ritual lainnya melalui surau atau masjid. Sebutan lain untuk Alim Ulama adalah *orang malin, tuangku* atau *orang syiak*.

c. *Cadiak Pandai*

Cadiak pandai adalah kelompok masyarakat yang memiliki pengetahuan luas tentang ilmu-ilmu yang bersifat umum, seperti pemerintahan, kemasyarakatan, dan sebagainya. Mereka menggunakan semua pengetahuan yang dimiliki untuk kepentingan orang banyak. Golongan ini mendapat banyak tempat yang terhormat di dalam masyarakat. Oleh karena itu *Cadiak Pandai* juga dianggap sebagai pemimpin.

Posisi *panghulu* dalam satu *ninil mamak* di Minangkabau sangatlah berpengaruh dalam menentukan kekuatan kekerabatan adat. Adat dan tradisi

tidak bisa berjalan tanpa adanya *panghulu* dan *ninil mamak* suatu *nagari* di Minangkabau. *Panghulu* merupakan orang yang memimpin sebuah suku. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Minangkabau memiliki organisasi matrilineal yang disebut suku. Setiap *panghulu* dalam satu *ninil mamak* memiliki pangkat atau gelar yang disebut *sako* yang dipanggil *Datuak*.

Panghulu dalam satu *niniak mamak* pemangku adat tersebut bertugas memimpin kaumnya yang terdiri dari orang-orang yang sesuku dengannya. Ia akan menjadi pengendali, pengarah, pengawas, pelindung dan pemberi keputusan terhadap anak kemenakan. Kedudukan *panghulu* menurut adat adalah *didahulukan selangkah ditinggikan seranting* dari yang lainnya. Sebagai seorang yang dipilih didahulu selangkah dan ditinggikan seranting, seorang *panghulu* harus memenuhi beberapa syarat tertentu. Antara lain, seorang *panghulu* harus beralam lapang dan berjiwa besar serta bijaksana dan *lubuk akal lautan budi* (Hasan, 1988:119).

Di dalam kaum tersebut terdapat beberapa organisasi yang lebih kecil lagi, yaitu rumah yang dipimpin oleh seorang *Mamak* yang disebut juga dengan *Tungganai*. Jadi *panghulu* pada hakikatnya memimpin beberapa *tungganai*. Kepemimpinan *panghulu* pemangku adat sangat dihormati. Tugas yang harus ia jalankan cukup berat dan mulia. Kewajiban untuk memimpin anak kemenakannya dan masyarakat di *nagari* tempat ia tinggal. Ia berkewajiban memelihara harta pusaka dan adatnya. Dalam melaksanakan tugas ia juga harus berpedoman kepada kebenaran. (<http://www.kabaranah.com>).

Secara singkat *panghulu* merupakan pemimpin yang menjadi pengendali pengarah pengawas pelindung terhadap anak kemenakan serta tempat keluarnya sebuah aturan dan keputusan yang dibutuhkan oleh masyarakat anak kemenakan yang dipimpin *panghulu*. Sedangkan *ninil mamak* merupakan satu kesatuan dalam sebuah lembaga perhimpunan *Pangulu* dalam suatu kanagarian di Minangkabau yang terdiri dari beberapa *Datuak -Datuak* kepala suku atau *panghulu* suku. *Datuak* sendiri adalah sebuah gelar pusako adat dalam suatu suku atau kaum yang diberikan kepada seseorang dengan dipilih, ditunjuk atau diangkat oleh kemenakan suatu suku atau kaum itu sendiri melalui upacara adat dengan syarat-syarat tertentu menurut adat Minangkabau.

Sebagai seorang *Datuak* yang merupakan *panghulu* dan anggota dari *ninil mamak*, ia harus menjaga martabatnya, serta harus mengetahui tugas dan tanggung jawabnya terhadap saudara dan kemenakannya dalam membina, mengayomi, melindungi dan mengatur pemanfaatan harta pusaka tinggi dan tanah ulayat untuk kemakmuran saudara dan kemenakannya, namun dia juga harus tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga di rumah tangganya terhadap anak dan istrinya, *Anak dipangku jo pancarian, kamanakan dibimbiang jo pusako*. Hal tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa seorang *Datuak* dia adalah *pangulu* dalam suku atau kaumnya dan sekaligus menjadi *ninil mamak* dalam *nagarinya*, atau dapat dikatakan bahwa *Datuak* merupakan gelarnya, *Pangulu* Jabatannya dan *Ninil mamak* lembaganya dalam nagari.

Hal menarik lainnya yang terdapat dalam sistem kekerabatan matrilineal masyarakat Minangkabau adalah terbentuknya strata sosial dalam masyarakat. Awal pembentukan strata ini berasal dari beberapa kepentingan golongan masyarakat untuk mengatur jalannya pernikahan dan pemerolehan status sosial dalam masyarakat. Kebudayaan dan tradisi yang ada menciptakan kelas sosial yang mena satu kelas lebih tinggi kedudukannya dari kelas lainnya. Tiga golongan strata sosial yang dikemukakan oleh Iva Ariani dalam artikelnya yang berjudul *Masyarakat Kebudayaan dan Politik* yang dimuat dalam jurnal *Filsafat, Vol. 25, No. 1, Februari 2015* tersebut yaitu,

- 1) Golongan Bangsawan, adalah golongan yang memiliki kedudukan yang tinggi dan mendapat kemudahan bagi setiap urusan. Seperti bangsawan yang memberikan mahar atau bayaran tinggi ketika menikah tapi golongan wanita bangsawan harus menikah dengan sesama golongan bangsawan. Golongan bangsawan ini terdiri dari *Kamanakan Tali Pariuk* dan *Kamanakan Tali Budi*. *Kamanakan Tali Pariuk* adalah golongan pertama yang bersifat bangsawan dan memiliki gelar bangsawan. *Kamanakan Tali Pariuk* dianggap keturunan langsung dari *urang asa*. Sedangkan *Kamanakan Tali Budi* adalah golongan para pendatang atau perantau yang sama kaya dan suksesnya dengan suku Minangkabau sehingga bisa dianggap seperti sama dengan keturunan dari *urang asa*.
- 2) Golongan Biasa, golongan ini bisa dikatakan mereka bisa hidup seperti biasa seperti membeli tanah dan rumah, walaupun tidak ada hubungan

dengan orang suku Minangkabau. Golongan ini terdiri dari *Kamanakan Tali Ameh* adalah golongan orang biasa dan sifatnya pendatang

- 3) Golongan Rendah, golongan ini tidak diizinkan untuk membeli tanah dan rumah, mereka dianggap datang dengan jalan menghamba atau sebagai budak ketika datang ke daerah suku Minangkabau. Golongan ini terdiri dari *Kamanakan Bawah Lutuik* adalah orang yang biasa menghamba kepada orang asa.

2.2.2 Teori Hegemoni Gramsci

Teori mengenai hegemoni dikemukakan oleh Antonio Gramsci (1891-1937) pemikir Italia yang terpengaruh oleh pemikiran Marxisme dan filsafat Hegel, meskipun kemudian merevisi dan mengkritik gagasan tersebut (Anwar, 2012: 63). Antonio Gramsci dapat dipandang sebagai pemikir politik terpenting setelah Marx. Teori hegemoni yang digagasnya merupakan sebuah teori politik paling penting abad XX. Hegemoni sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Hegeisthai* yang mempunyai pengertian memimpin, kepemimpinan, dominasi, dan kekuasaan yang melebihi kekuasaan yang lain.

Teori hegemoni sebenarnya bukanlah hal yang baru bagi tradisi Marxis. Pengertian semacam itu sudah dikenal oleh orang Marxis lain sebelum Gramsci, seperti; Karl Marx, Sigmund Freud, dan Sigmund Simmel. Teori hegemoni sendiri pertama kali dipakai oleh Plekhnov dan pengikut Marxis Rusia lainnya (1880) untuk menunjuk pada perlunya kelas pekerja membangun kelas aliansi dengan petani dengan tujuan untuk mengalahkan gerakan Tsarisme. Pengertian tersebut kemudian digunakan Lenin, yang menganjurkan agar

dalam aliansinya dengan para petani, kelas pekerja Rusia harus bertindak sebagai kekuatan hegemonik (kekuatan utama) (Wiyatmi, 2013:163).

Gramsci mengubah makna hegemoni yang strategi (menurut Lenin) menjadi sebuah konsep yang menjadi sarana untuk memahami masyarakat dengan tujuan untuk mengubahnya. Teori hegemoni Gramsci merupakan teori penyempurna kelas Marx yang belum berhasil merumuskan teori politik yang memadai (Wiyatmi, 2013: 163). Hal yang membedakan teori hegemoni Gramsci dengan penggunaan istilah serupa itu sebelumnya adalah; Pertama, Gramsci menerapkan konsep ini lebih luas bagi supremasi satu kelompok atau lebih atas lainnya dalam setiap hubungan sosial, sedangkan pemakaian istilah ini sebelumnya hanya menunjuk pada relasi antara proletariat dan kelompok lainnya. Kedua, Gramsci juga mengkaraktirikan hegemoni dalam istilah “pengaruh kultural”, tidak hanya “kepemimpinan politik dalam sebuah sistem aliansi” sebagaimana dipahami generasi Marxis terdahulu.

Konsep hegemoni memang dikembangkan atas dasar dekonstruksinya terhadap konsep-konsep Marxis ortodoks. Teori hegemoni tersebut sering kali disebut juga sebagai teori kultural atau ideologis general dan digunakan untuk memahami bentuk-bentuk politis, kultural, dan ideologi yang dianggap memiliki kekuatan untuk memformasi masyarakat (Faruk, 2010:61). Teori ini juga muncul sebagai kritik dan alternatif bagi pendekatan dan teori perubahan sosial sebelumnya yang didominasi oleh penentuan kelas dan ekonomi Marxisme tradisional.

Teori hegemoni Gramsci sebenarnya merupakan hasil pemikiran Gramsci ketika Ia di penjara yang kemudian dibukukan dengan judul *Selection from The Prisons Notebook* yang banyak dijadikan acuan atau diperbandingkan khususnya dalam mengkritik pembangunan. Sebagai pemikir Marxis Italia setelah Marx, pemikirannya banyak berhubungan dengan masalah politik praktis sehingga pandangan Gramsci yang paling dominan adalah hegemoni.

Menurut Gramsci, hegemoni didefinisikan sebagai sesuatu yang kompleks, yang sekaligus bersifat ekonomik dan etis-politik. Hegemoni menghubungkan antara kelas dengan kekuatan sosial lain. Kelas hegemonik (kelas yang memimpin) menurut Gramsci adalah kelas yang mendapatkan persetujuan dari kekuatan dan kelas sosial lain dengan cara menciptakan dan mempertahankan sistem aliansi melalui perjuangan politik dan ideologis (Simon, 2010:22). Supermasi suatu kelompok sosial menyatakan dirinya dalam dua cara, yaitu sebagai “dominasi” dan sebagai “kepemimpinan moral dan intelektual” suatu kelompok sosial mendominasi kelompok-kelompok antagonistik yang cenderung ia “hancurkan”, atau bahkan ia taklukkan dengan kekuatan tentara (Faruk, 2013:68). Hal ini menggambarkan adanya dominasi suatu kelas yang terjadi karena aspek ideologis politis.

Gramsci sependapat dengan Marx bahwa dalam tatanan masyarakat terdapat perbedaan kelas, yaitu kelas atas (borjuis) dan kelas bawah (proletar) atau masyarakat politis dan masyarakat sipil. Masyarakat kelas atas masyarakat politis (borjuis) merupakan masyarakat yang memegang kendali atas sebuah wilayah, dalam arti luas masyarakat borjuis ini bisa berupa pemimpin dalam satu

golongan, badan-badan negara, angkatan udara, kepolisian, dan birokrasi pusat yang secara politis berperan sebagai penguasa dominan. Sedangkan masyarakat kelas bawah atau masyarakat sipil (proletar) yang dimaksud oleh Gramsci terbentuk dari kelompok masyarakat “suka-rela” atau sekurang-kurangnya yang bersifat rasional dan tidak memaksa, seperti sekolah, keluarga, serikat, dan sebagainya (Said, 2010: 9).

Menengok pada pemikiran Gramsci, hegemoni berhubungan dengan sikap dan strategi dalam mengkoordinasikan dan memperoleh kekuasaan yang dilakukan oleh organisasi atau kelompok tertentu dalam praktek kekuasaan (Kurniawan, 2012: 72). Tentu hal ini menuntut kontak antara “yang memimpin” dan “yang dipimpin”. Agar mampu mencapai kepemimpinannya, ideologi harus disebarkan, penyebaran ini bisa melalui bentuk-bentuk sekolah dan pengajaran atau sifat-sifat kelompok sosial yang dominan. Oleh karena itu, hegemoni pada hakikatnya adalah upaya untuk menggiring orang agar menilai dan memandang problematika sosial dalam kerangka yang ditentukan.

Gramsci menggunakan konsep itu untuk meneliti bentuk-bentuk politis, kultural, dan ideologis tertentu. Hal ini merujuk pada situasi sosial politik, di mana ideologi dan praktek sosial masyarakat menyatu dalam keadaan seimbang sehingga dominasi menyebar dari masyarakat melalui sebuah lembaga perseorangan, yang kemudian dapat membentuk moralitas, adat, agama, dan prinsip-prinsip dalam masyarakat dan hegemoni selalu berhubungan dengan penyusunan kekuatan Negara sebagai kelas diktator (William via Patria & Arief,

2009: 121). Dengan kata lain Gramsci menghubungkan hegemoni pada masyarakat sipil dengan hegemoni masyarakat politik yang bersifat diktator.

Hegemoni dapat dikatakan sebagai dominasi kekuasaan atas kelas sosial atas kelas sosial lainnya. Pelaksanaan hegemoni tersebut dilakukan melalui kepemimpinan intelektual dan moral yang dibantu dengan dominasi atau penindasan baik melalui kekerasan ataupun tidak. Hal ini sesuai dengan pendapat Simon (2014: 19) yang menyatakan bahwa titik awal konsep Gramsci tentang hegemoni adalah bahwa suatu kelas menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas dibawahnya dengan cara kekerasan dan perusasi.

Belum ada pembahasan lebih dalam mengenai jenis-jenis dari hegemoni itu sendiri namun, dari berbagai pendapat para ahli yang mengacu pada pemikiran Gramsci bahwa suatu kelas menjalankan kekuasaan terhadap kelas dibawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi sehingga dari pemikiran itu terdapat dua jenis hegemoni yaitu, hegemoni yang disadari (kekerasan), dan hegemoni yang tidak disadari (persuasi). Hal ini sejalan dengan pendapat Simon yang menyatakan bahwa titik awal Gramsci tentang hegemoni adalah bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan jalan kekerasan dan persuasi (Simon, 2014: 19). Dengan demikian jenis hegemoni yang disadari maupun yang tidak disadari akan disebarkan oleh lembaga-lembaga sosial terlebih dahulu.

Bentuk dari jenis hegemoni yang disadari yaitu berupa kekerasan (reseptif/dominasi) yang dilakukan kelas atas terhadap kelas bawah disebut

dengan tindakan dominasi. Tindakan dominasi tersebut biasanya bersifat negatif karena berupa kekerasan, penindasan, paksaan, perampasan, sanksi yang diterapkan oleh penguasa, hukum yang menakutkan, dan perantara tindakan dominasi dilakukan oleh para aparaturnegara. Sedangkan bentuk dari jenis hegemoni yang tidak disarai berupa persuasi yang dilaksanakan dengan cara-cara halus seperti, provokasi, menarik empati, dan membangun komunikasi atau percakapan yang kuat dengan maksud untuk mempengaruhi, mengarahkan, menguasai dan melanggengkan dominasi, hingga membentuk pola pikir masyarakat.

Selain dua jenis hegemoni tersebut, Ada tiga tingkatan hegemoni yang dikemukakan oleh Gramsci, yaitu hegemoni total (*integral*), hegemoni merosot (*decadent*), dan hegemoni yang minimum. Ketiga tingkatan hegemoni menurut Gramsci itu diungkapkan Femia (dalam Hendarto, 1993: 82-84) yaitu:

- a. Hegemoni Total (*integral*). Hegemoni integral ditandai dengan afiliasi massa yang mendekati totalitas. Masyarakat menunjukkan tingkat kesatuan moral dan intelektual yang kokoh. Ini tampak dalam hubungan organis antara pemerintah dan yang diperintah. Hubungan tersebut tidak diliputi dengan kontradiksi dan antagonisme, baik secara sosial maupun etis. Hegemoni intergral bisa disebut juga dengan hegemoni total yaitu hegemoni yang secara efektif bekerja menyeluruh ke semua aspek kehidupan masyarakat sehingga mematikan inisiatif pemberontakan.
- b. Hegemoni yang merosot (*decadent hegemony*). Dalam masyarakat kapitalis modern, dominasi ekonomis borjuis menghadapi tantangan berat yang

menunjukkan adanya potensi disintegrasi. Dengan kata lain hegemoni ini tidak cukup efektif dan tidak berhasil melumpuhkan kepatuhan seluruh masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat sebenarnya melihat banyak ketimpangan dan dalam diri mereka terdapat banyak ketidaksetujuan serta ketidaksepakatan namun tidak disertai dengan tindakan atau pemberontakan yang kongkret (*passive resistance*).

- c. Hegemoni minimum (*minimal hegemony*). Bentuk ketiga ini merupakan hegemoni yang gagal ditanamkan ke masyarakat dan ditanggapi dengan perlawanan dan pemberontakan.

Secara literasi hegemoni berarti sebuah kepemimpinan. Istilah ini umumnya dipakai oleh komentator politik untuk menunjuk dominasi kekuasaan dan kepemimpinan. Gramsci sendiri menganggap bahwa istilah tersebut mengacu kepada pengertian yang kompleks dan tentu di dalamnya bentuk-bentuk politis, kultural, dan ideologis turut membangun kepemimpinan ini secara tawar-menawar bukan yang bersifat memaksa (Faruk, 2010: 132). Hegemoni bergerak dari lembaga-lembaga sosial, tokoh-tokoh intelektual, sampai kepada kelas sosial yang menjadi sasarannya.

Lebih jauh dikatakan Gramsci bahwa bila kekuasaan hanya dicapai dengan mengandalkan kekuasaan yang memaksa, hasil nyata yang berhasil dicapai dinamakan “dominasi”. Stabilitas dan keamanan memang tercapai, sementara gejolak perlawanan tidak terlihat karena rakyat memang tidak berdaya (Sugiono, 2006:37-40). Hal ini berhubungan dengan konsep hegemoni yang terkait dengan tiga bidang, yaitu ekonomi, Negara, dan rakyat.

Hegemoni secara literasi berarti “kepemimpinan” yang di dalamnya tentu memiliki kekuasaan. Kekuasaan dalam prespektif hegemoni merupakan sebuah kemampuan potensial yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok untuk menguasai orang lain, memaksa dan mengendalikan mereka sampai mereka mematuhi perintah. Hal ini sesuai dengan pendapat Robbins dan Judge (dalam *Jurnal Administrasi Bisnis (2011), Vol.7, No.1 : hal. 46*) yang menyatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain, sehingga orang lain tersebut akan berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh orang yang memiliki kekuasaan.

Kekuasaan tersebut diartikan sebagai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. Bagi masyarakat yang tidak bersifat totaliter, bentuk-bentuk kebudayaan tertentu sering kali tampak lebih dominan daripada bentuk-bentuk yang lainnya. Bentuk kepemimpinan yang seperti ini didefinisikan Gramsci sebagai hegemoni, yaitu suatu konsep mutlak bagi setiap upaya untuk memahami kehidupan kultural dan masyarakat (Said, 2010:9).

Schwenz (dalam jurnalnya *Postcolonial Studies, Hegemony in Gramsci*) mencoba memberikan pemahaman lebih mengenai hegemoni. Ia tidak sependapat jika hegemoni diartikan atau dipahami hanya sebagai sebuah kepemimpinan, ia sependapat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Said (2010). Menurutnya hegemoni dalam kajian sosiologi dan politik lebih tepat diartikan atau dipahami sebagai sebuah dominasi dan pengendalian/kontrol. Pendapat ini menggabungkan kepemimpinan yang lebih khusus dalam teori hegemoni, yaitu sebuah

kepemimpinan yang memiliki pengendalian/atau control lebih serta mendominasi.

Lebih jauh dalam jurnalnya Schwenz menyatakan bahwa Hegemoni kekuasaan / pengendalian mengacu pada sistem dominasi suatu etnis, dimana elit politik/yang berkuasa mengendalikan komunitas etnis yang lebih rendah dengan sedemikian rupa, sehingga bisa mengantisipasi bentuk pemberontakan yang bisa muncul sebagai akibat dari hegemoni tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Raymond Williams dalam bukunya yang berjudul *Marxism and Literature* (1977) (dalam jurnal *Postcolonial Studies, Hegemony in Gramsci* by Caroline Lee Schwenz), hegemoni bersifat dinamis dan tidak hanya secara pasif terwujud dan eksis sebagai bentuk dominasi. hegemoni terus menerus diperbaharui, diciptakan ulang, dipertahankan, dan dimodifikasi, dan sebaliknya, hegemoni juga terus menerus dilawan, dibatasi, diubah, dan ditantang oleh tekanan disekelilingnya.

Pengertian kekuasaan memang ambigu, terkesan mempesona sekaligus menakutkan, kekuasaan sangat mempesona ketika menggambarkan sosok penguasa yang berkarisma, tangguh, berprestasi menarik, dapat mengatur dan mengendalikan kekacauan yang ada. Di lain pihak kekuasaan sangat menakutkan karena kekuasaan cenderung busuk, disalahgunakan untuk menindas rakyat, memaksa, dan merampas kebebasan mereka. Dengan kata lain kekuasaan dapat diartikan sebagai sebuah potensi untuk mempengaruhi orang lain (Bass, 1990 dalam *Jurnal Administrasi Bisnis*(2011), Vol.7, No.1 : hal. 46).

2.2.2.1 Sastra dalam Prespektif Hegemoni Gramsci

Antonio Gramsci memandang sastra sebagai sebuah cerminan keadaan masyarakat yang digambarkan oleh pengarang pada masa penciptaan karya sastra tersebut. Semua problematika dan permasalahan yang digambarkan oleh pengarang dalam karyanya dianggap sebagai refleksi dari kenyataan yang ada. Walaupun teori hegemoni tidak secara langsung berbicara mengenai kesusastraan, namun teori hegemoni Gramsci banyak dipakai sebagai dasar kajian sosiologi sastra, seperti yang pernah dilakukan oleh Raymond Williams, Tony Davis, maupun Ariel Hreyanto (Faruk, 2013:7).

Telaah karya sastra dalam kerangka teori hegemoni Gramsci yang dilakukan oleh Raymond Williams (Faruk, 2013:78-82) menjelaskan eksistensi karya sastra sebagai salah satu situs hegemoni, menjadi proses dasar dari formasi sosial yang lewatnya hegemoni bekerja dan diperjuangkan. Perjuangan tersebut salah satunya berupa kritikan para sastrawan yang merasa tidak setuju atau bahkan menentang gejala sosial dalam masyarakat sehingga ia bekerja dan memperjuangkan aspirasi serta gagasannya terhadap suatu fenomena sosial yang ada.

Konsep hegemoni oleh Williams (via Faruk, 2013:79) dipakai untuk menganalisis proses kultural dalam peranannya yang aktif atau konstitutif. Di samping itu, juga dipakai untuk menganalisis bentuk-bentuk kultural oposisional dan alternatif yang mungkin menentang tatanan dominan, bahkan ketika bentuk-bentuk itu masih terbungkus atau termarginalisasikan oleh batas-

batas dan tekanan hegemonik. Kerangka teori tersebut kemudian diterapkan oleh Williams untuk menganalisis sastra Inggris, dalam esainya yang berjudul *“Forms of English Fiction in 1848”*, dalam penelitiannya tersebut dijelaskan hubungan yang kompleks antara bentuk-bentuk fiksi Inggris yang residual, dominan, dan bangkit (Faruk, 2013: 80-82).

Sebagai salah satu situs hegemoni, karya sastra dipandang sebagai bagian integral dari kebudayaan. Dalam hal ini pengarang termasuk dalam kategori kaum intelektual organik yang merupakan salah satu aparat hegemonik (Faruk, 2013:67). Kebudayaan yang ada tersebut muncul dari dua sumber. Pertama, bersama-sama dengan suatu kelas baru. Se jauh kebudayaan dominan dapat mempertahankan posisinya, ia secara langsung bergerak untuk menginkorporasikan elemen-elemen kebudayaan tersebut melalui kelas baru yang bersangkutan. Kedua, kebudayaan yang bangkit itu juga bersumber dari kompleksitas praktek-praktek manusia itu sendiri. Kebudayaan dominan bersifat selektif dan cenderung memarginalisasikan dan menekan seluruh praktek manusia yang lain.

Menurut Gramsci kesusastraan menjadi salah satu bagian dari gagasan, kebudayaan suprastruktur yang tidak hanya sebagai refleksi (gerakan pantulan) dari struktur kelas ekonomi atau infrastruktur (sarana) yang bersifat material, melainkan sebagai salah satu kekuatan material itu sendiri (Faruk, 2013: 61-63). Artinya dalam sebuah karya sastra terdapat sebuah gagasan dari kebudayaan yang lebih luas tidak hanya sebatas hubungan timbal balik dari sebuah struktur sosial

atau sarana yang ada dengan karya sastra namun dapat menjadi sebuah kekuatan yang lebih besar yang dihasilkan oleh gagasan kebudayaan tersebut.

Sebagai produk kebudayaan, karya sastra merupakan situs hegemoni. Dalam karya sastra terjadi ideologi yang menghegemoni masyarakat yang di counter dengan ideologi pengarang (Faruk 2013: 79). Sastra dalam perspektif Gramsci (Kurniawan, 2012: 84) dipandang sebagai dua hal yakni: Pertama, sastra sebagai gejala pertama untuk merepresentasikan ideologi kelas sosial si pengarang dalam mengkonsep pandangannya tentang dunia. Sastra dianggap sebagai media hegemoni dan media mengidentifikasi ideologi yang terjadi di masyarakat. Kedua, ideologi dalam sastra bisa juga diidentifikasi dengan memahami sastra dalam konteks otonominya karena merupakan wujud dari intuisi-imajinasi pengarang.

Selanjutnya, Faruk (2013: 74) menjelaskan bahwa sebagai salah satu situs hegemoni, dalam karya sastra terdapat formasi ideologi. Formasi adalah suatu susunan dengan hubungan yang bersifat bertentangan, korelatif, dan subordinatif. Agar dapat mencapai hegemoni, ideologi harus disebarkan. Penyebaran tersebut menurut Gramsci (via Faruk, 2013:70, 74) tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan melalui bahasa, *common sense* (pemikiran awam), folklore (yang di dalamnya meliputi sistem kepercayaan menyeluruh, tahyul-tahyul, opini-opini, dan cara-cara melihat tindakan dan segala sesuatu), lembaga-lembaga sosial tertentu yang menjadi pusatnya seperti bentuk-bentuk sekolah dan pengajaran atau berbagai lembaga penerbitan.

Teori hegemoni Gramsci memang tidak membahas karya sastra atau kesusastraan secara jelas, namun dari berbagai uraian di atas sangat jelas digambarkan bahwa karya sastra dapat menjadi salah satu situs hegemoni, karena dalam penciptaannya karya sastra tidak bisa dipisahkan dari kenyataan sosial atau lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggal pengarang. Gramsci menganggap bahwa dalam sebuah karya sastra pasti memiliki latarbelakang sejarah kebudayaan yang hampir sama dengan kebudayaan masyarakat yang ada.

Pandangan Gramsci mengenai karya sastra sangatlah kuat. Ia memandang karya sastra sebagai integral dari kebudayaan karena melalui karya sastra pengarang dapat merepresentasikan ideologi kelas sosial dalam mengkonsep pandangan pengarang tentang dunia serta. Sastra dianggap sebagai media hegemoni dan media mengidentifikasi ideologi yang terjadi di masyarakat. Lebih jauh ideologi dalam sastra bisa juga diidentifikasi dengan memahami sastra dalam konteks otonominya karena merupakan wujud dari intuisi-imajinasi pengarang.

2.2.2.2 Dominasi dalam Prespektif Hegemoni Gramsci

Dominasi merupakan penguasaan oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah. Penguasaan ini dapat mencakup berbagai hal seperti dalam bidang politik, militer, ekonomi, perdagangan, olahraga dan lain sebagainya. Dominasi dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok. Dalam jangkauan yang lebih luas dominasi biasanya dilakukan oleh kelompok

atau suatu ras, dan bersifat negatif. Dominasi bisa mengambil beragam bentuk, yaitu fisik, ekonomi, politik, sosial, budaya atau simbolik (Haryatmoko, 2010:x)

Dominasi dalam prespektif hegemoni merupakan suatu paham politik yang digunakan untuk menaklukkan atau menguasai suatu daerah atau beberapa daerah. Proses penguasaan yang dilakukan oleh suatu ras atau kelompok yang dapat menimbulkan perpecahan dan kerugian bagi masyarakat yang didominasi ini dapat terjadi saat suatu kelompok atau ras berusaha menguasai kelompok tertentu dengan cara apapun. Bila dibiarkan, bentuk-bentuk dominasi itu akan menghasilkan diskriminasi, kekerasan, dan ketidakadilan (Haryatmoko, 2010 : 3). Kemungkinan kerugian lain yang dapat terjadi yaitu, pengusiran, perebutan atau perampasan hak atas sesuatu, perbudakan hingga terjadinya pembunuhan.

Lebih dalam Strinati (1995: 165) memandang dominasi dalam prespektif hegemoni berupa kelompok yang **dominan** secara fundamental dalam masyarakat tidak berarti merupakan kelas penguasa, karena ia mempertahankan dominasinya dengan mengamankan “persetujuan spontan” dari kelompok subordinat, termasuk kelas pekerja dengan cara konsensus politis dan ideologis yang dinegeosiasikan dengan menggabungkan antara kelompok dominasi dan terdominasi.

“...Dominant groups in society, including fundamentally but not exclusively the ruling class, maintain their dominance by securing the ‘spontaneous consent’ of subordinate groups, including the working class, through the negotiated construction of a political and ideological consensus which incorporates both dominant and dominated groups” (Strinati, 1995: 165).

Dominasi tidak selalu dalam bentuk penjajahan atau kasat mata seperti penindasan fisik, ekonomi, sosial, tetapi bisa dalam bentuk dominasi simbolik yang sering secara sadar atau tidak disetujui oleh korbannya. Awal dominasi ini adalah adanya hubungan sosial yang ditandai oleh interaksi sosial. (Haryatmoko, 2010: 9). Dominasi ini bisa berawal dari adanya sebuah dominasi wacana, yaitu adanya wacana dalam suatu kelompok yang sangat kuat dan kemudian wacana tersebut diyakini sebagai sebuah kebenaran dalam masyarakat itu sendiri. Adanya wacana tersebut kemudian membuat dominasi simbolik yang terkadang tidak disadari oleh korbannya.

Dominasi ini terlaksana melalui simbolis komunikasi, pengetahuan dan prinsip simbolis itu sendiri. Prinsip ini berupa bahasa, gaya hidup, cara berfikir, berpakaian atau bertindak, ciri-ciri khas dan stigma. Sedangkan yang paling efektif secara simbolis adalah ciri tubuh, padahal sebelumnya sangat sewenang-wenang seperti warna kulit (Haryatmoko, 2010; 7). Dalam dominasi simbolis terlihat cara bagaimana elemen itu dipaksakan dan diderita sebagai kepatuhan, efek dari kekerasan simbolis, kekerasan halus tidak dirasakan dan terlihat bahkan oleh korbannya sendiri (Bourdieu, 1980: 216). Artinya dampak dari dominasi simbolik secara halus dapat berupa sesuatu hal yang ditekankan dalam masyarakat namun masyarakat atau korban tersebut tidak menyadarinya seperti komunikasi persuasi, sedangkan dampak lainnya berupa kekerasan yang dirasakan korban berupa paksaan dan derita sebagai kepatuhan.

Sejalan dengan pembahasan di atas bahwa dominasi dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui eksploitasi terhadap ideologi, agama, kebudayaan dan wilayah untuk mendapatkan tujuan tertentu. Di bidang agama, muslihat dominasi tampil dengan adanya jarak antara cita-cita agama dan realitas kehidupan beragama. Agama sering tampil dalam dua wajah yang bertentangan. Cukup menyedihkan ketika agama dikaitkan dengan fenomena kekerasan, bukannya untuk mengelakkan konflik, tetapi malahan memberikan landasan ideologis dan pembenaran simbolis (Haryatoko, 2010: 81-83).

Dalam kenyataannya bentuk-bentuk hegemoni tampak dalam pengaruh kepemimpinan atau wewenang, karena kekuasaan merupakan bagian dari setiap orang dan akan hadir saat manusia melakukan interaksi sosial dengan sesamanya. Dominasi sering diartikan juga sebagai suatu kekuasaan yang dibangun oleh relasi yang tidak seimbang, yang mana perbedaan antara wewenang dengan kekuasaan sangat penting, artinya kekuasaan cenderung menaruh kepercayaan pada kekuatan, sedangkan otoritas adalah kekuasaan yang dilegitimasikan.

2.2.2.3 Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Hegemoni Kekuasaan

Konflik sosial yang didasari oleh adanya dominasi kekuasaan dalam masyarakat memang memiliki sebab dan akibat yang beragam. Sebagian besar memang sering disebabkan oleh status, kekuasaan, kekayaan, usia, peran menurut gender, dan keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu. Hal ini tentunya dapat mengakibatkan adanya kehancuran pada suatu tatanan atau

struktur sosial dalam masyarakat seperti terjadinya kekerasan, penindasan, hingga bahkan peperangan.

Akar dari adanya dominasi kekuasaan sebenarnya karena masih adanya kebudayaan yang dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang kebenarannya masih diragukan namun terus menerus dilakukan. Kebudayaan yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu sebuah kebudayaan yang telah mendoktrin pemikiran maupun perilaku masyarakat itu sendiri. Menurut Williams kebudayaan terbentuk dari dua sumber. Pertama, bersama-sama dengan suatu kelas baru. Sejauh kebudayaan dominan dapat mempertahankan posisi-posisinya, ia secara langsung bergerak untuk menginkorporasikan elemen-elemen kebudayaan itu. Kedua, kebudayaan yang bangkit itu juga bersumber dari kompleksitas praktik-praktik manusia itu sendiri (Faruk, 2013:157)

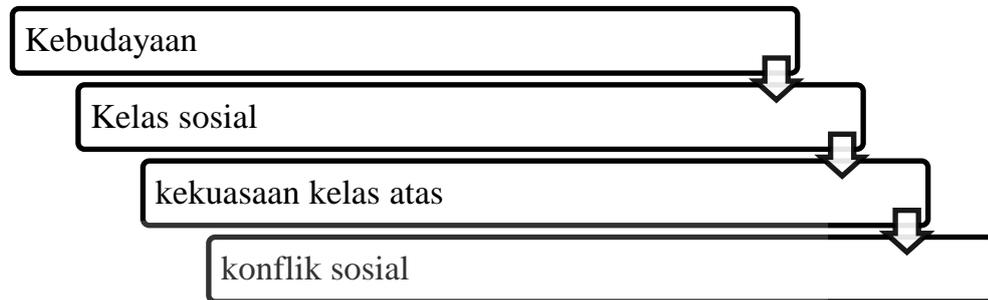
Lebih jauh kebudayaan yang dimaksud merupakan kebudayaan yang nantinya akan menghasilkan pembagian kelas sosial dalam masyarakat yang kemudian disertai dominasi oleh salah satu kelas sosial terhadap kelas sosial lainnya. Marx (dalam Damono, 2010: 36) dalam dokumennya yang dikenal sebagai Manifesto Komunis menyatakan bahwa sejarah sosial manusia tak lain adalah sejarah perjuangan kelas. Adanya pembagian kelas sosial dalam masyarakat yaitu kaum atas dan kaum bawah di mana kaum atas akan memegang peranan penting termasuk kendali lebih atas kelas bawah menjadi titik awal adanya dominasi kekuasaan dalam masyarakat.

Banyak faktor yang menjadi penyebab adanya pembagian kelas sosial dalam masyarakat salah satunya faktor ekonomi. Pertama, Marx dan Engels menyadari bahwa pembagian kerjalah yang memegang peranan penting dalam kehidupan sosial (Damono, 2010:37). Faktor ekonomi dianggap sebagai dasar dari pembagian kelas sosial karena memegang peranan yang sangat besar dalam pembagian kelas sosial tersebut.

Adanya kelas sosial dalam masyarakat pasti tidak bisa terlepas dari konteks memimpin dan dipimpin. Pemimpin pasti memiliki kekuasaan dalam menjalankan dan mempertahankan kepemimpinannya. Masyarakat kelas atas sebagai pelaku dominasi dapat memiliki kekuasaan yang diperoleh melalui pembawaan sejak lahir seperti seorang raja, atau dalam masyarakat modern kekuasaan tersebut diperoleh karena kedudukannya dalam suatu struktur seperti seorang presiden, melalui sumber-sumber kemakmuran seperti kekayaan, akses jaringan kerja atau koneksi sosial, kemampuan atau keahlian lebih, serta kepribadian yang dipengaruhi oleh adanya kombinasi dari kepercayaan diri, sikap dan watak serta memiliki popularitas lebih dalam status sosial.

Kekuasaan yang mendominasi tentu akan menciptakan konflik sosial karena adanya kesenjangan antara kelas atas dan kelas bawah. Surbakti (1992: 109) mengatakan bahwa konflik terjadi karena dalam masyarakat terdapat kelompok-kelompok kepentingan, lembaga-lembaga, organisasi, dan kelas-kelas sosial yang tidak selalu memiliki kepentingan yang sama dan serasi. Di antara kelompok-kelompok tersebut memiliki perbedaan taraf kekuasaan dan wewenang.

Gambar faktor terjadinya dominasi kekuasaan



2.2.3.4 Dampak dari adanya Hegemoni Kekuasaan

Konflik sosial yang dihasilkan dari adanya kekuasaan suatu kelas atas kelas lainnya karena adanya pembagian kelas sosial dalam masyarakat yang disebabkan oleh suatu kebudayaan tentu memiliki dampak bagi sebagian masyarakat khususnya masyarakat yang terdominasi. Dampak negatif terkadang memang lebih nampak daripada dampak positif. Hal ini sejalan dengan pendapat Haryatmoko bahwa bila dibiarkan bentuk-bentuk dominasi itu akan menghasilkan diskriminasi, kekerasan dan ketidakadilan (Haryatmoko, 2010:4)

Dampak negatif terbesar dari adanya dominasi kekuasaan dalam bentuk diskriminasi yang di dalamnya terdapat kekerasan. Hal ini akan memicu hancurnya kesatuan yang ada dalam struktur sosial jika konflik yang dihadapi tidak berhasil diselesaikan. Hancurnya kesatuan yang ada dalam tatanan masyarakat tersebut dapat memacu konflik yang lebih besar sehingga dapat menimbulkan kekerasan yang lebih besar atau peperangan.

Kedua, adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat memicu hancurnya nilai-nilai moral dan norma sosial yang ada. Hal ini dapat terjadi dari perubahan kepribadian individu atau kelompok tertentu yang semula memiliki kepribadian yang pendiam, sabar berubah menjadi pemaarah, agresif dan pendendam sehingga mengakibatkan ketidakpatuhan pada nilai nilai norma sosial yang ada. Konflik yang berkepanjangan akibat adanya perselisihan yang disebabkan oleh dominasi kekuasaan juga merugikan masyarakat yang termarginalkan berupa, perampasan atas hak miliknya, penindasan hingga pengasingan.

Dalam kaitannya dengan dominasi, Kornblum (Dalam Faruk: 2010: 28-31) menyatakan bahwa terdapat empat macam kemungkinan proses yang dapat terjadi dalam suatu hubungan antar kelompok yang di dalamnya terdapat dominasi, yaitu:

1. Pembunuhan (genosida)

Merupakan salah satu tindakan pembunuhan secara sengaja dan sistematis terhadap anggota kelompok tertentu. Tindakan ini dianggap sebagai tindakan yang paling berbahaya yang disebabkan oleh adanya dominasi yang menghancurkan struktur sosial dalam masyarakat.

2. Pengusiran

Suatu tindakan pembuangan, pengasingan, atau pengusiran seseorang dari daerah tempat tinggalnya sebagai bentuk hukuman atau karena individu tersebut tidak lagi berhak tinggal di daerah tersebut. Pengusiran juga

merupakan salah satu pengambilan paksa hak atas miliknya, hal ini juga disebabkan oleh adanya struktur sosial yang hancur dalam masyarakat.

3. Perbudakan

Merupakan suatu proses pengambilan atau penghapusan hak hak yang dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu, dan ia tidak berhak melawan atas semua tindakan – tindakan yang diterimanya dari individu atau kelompok yang memperbudaknya dalam bentuk apapun.

4. Pengucilan (segregasi)

Suatu pemisahan antara kulit putih dan kulit hitam di Afrika Selatan pada masa politik apartheid. Segregasi juga dapat diartikan sebagai pengasingan atau pengucilan suatu golongan terhadap golongan lain yang dianggap berbeda dan dianggap kedudukannya lebih rendah dari golongannya sendiri.

5. Aslimilasi

Penggabungan antara suatu kelompok dengan kelompok lain dan menimbulkan suatu kebudayaan baru, namun dari adanya kebudayaan baru tersebut, kelompok tersebut kemudian menghilangkan kebudayaannya masing-masing (Kornblum dalam Faruk: 2010: 28-31).

Pada kenyataanya sebuah fenomena dalam masyarakat tidak hanya memiliki dampak negatif, namun di dalamnya terdapat dampak positif. Salah satu dampak positif yang dihasilkan oleh adanya dominasi kekuasaan yaitu dapat menggugah masyarakat yang bisanya bersifat pasif menjadi aktif dalam memerankan peranannya dalam masyarakat, selain itu dapat menumbukan persatuan bagi individu yang satu dengan individu lain atau suatu kelompok yang

merasa memiliki nasib sama yang dihasilkan dari dominasi kekuasaan, atau dengan kata lain dapat menumbuhkan rasa solidaritas antar individu atau kelompok.



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk hegemoni kekuasaan yang dilakukan oleh pemangku adat Minangkabau dalam novel *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* karya Hamka meliputi adanya kekerasan, penghinaan, paksaan dan perampasan. Bentuk-bentuk tersebut tergolong dalam jenis hegemoni yang disadari. Sedangkan bentuk hegemoni yang berupa provokasi untuk mempengaruhi dan merubah pola fikir termasuk dalam jenis hegemoni yang tidak disadari. Semua bentuk hegemoni baik yang disadari maupun tidak dilakukan oleh semua pemangku adat kepada Hayati dan keluarga Zainuddin dalam novel *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* karya Hamka.
2. Faktor dari terjadinya hegemoni kekuasaan yang dilakukan pemangku adat di Minangkabau adalah masih adanya budaya matrilineal yang dipegang teguh masyarakat Minangkabau. Budaya ini mengatur susunan kekerabatan dan garis keturunan yang ditentukan berdasarkan garis ibu. Seorang anak yang ibunya tidak berasal dari Minangkabau dianggap tidak memiliki suku dan tidak *berbako*. Awal dari adanya hegemoni kekuasaan berasal dari adat yang secara tidak langsung memberikan pemimpin adat sebuah kekuasaan. Secara tidak langsung kebudayaan ini menciptakan kelas

sosial dalam masyarakat, yaitu kelas atas dan kelas bawah. Pemimpin seperti pemangku adat dikategorikan sebagai kelas atas dan yang dipimpin seperti masyarakat biasa dan masyarakat yang tidak memiliki ibu dari Mianangkabau sebagai kelas bawah. Selain itu faktor selanjutnya adalah adanya tindakan-tindakan yang dianggap melanggar hukum adat dan merusak nama baik sebuah keluarga. Faktor usia dan banyaknya pengalaman juga dijadikan penyebab terjadinya hegemoni kekuasaan yang dilakukan oleh para pemangku adat.

3. Dampak dari adanya hegemoni kekuasaan yang dilakukan oleh pemangku adat adalah adanya pembunuhan, pengusiran baik disadari maupun tidak disadari, perbudakan dan hilangnya hak atas kekayaan, pendidikan, gelar, status sosial dalam masyarakat dan hak asasi manusia. Semua dampak tersebut dirasakan oleh korban-korban dari adanya hegemoni kekuasaan yang dilakukan oleh pemangku adat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pembaca

Minat mengapresiasi sebuah karya sastra bagi pembaca hendaknya terus ditumbuhkembangkan karena banyak manfaat yang dapat diambil dari karya sastra, baik sebagai sarana menghibur diri maupun pencerahan bagi pembacanya. Begitupula dengan novel *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* Karya Hamka meskipun tergolong ke dalam novel lama namun disarankan pembaca masih membaca dan mengapresiasi karya ini karena

pada kenyataanya karya Hamka ini masih ada relevansinya dengan masyarakat pada saat ini. Selanjutnya melalui penelitian ini pembaca diharapkan tidak hanya mendapatkan pencerahan, namun pengetahuan lebih dalam mengenai budaya yang ada di Minangkabau, serta wujud ketimpangan sosial yang ada dalam lingkungan pada saat itu. Novel *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* karya HAMKA memang menggunakan ejaan bahasa Indonesia lama yang terkadang susah untuk dipahami, akan tetapi pembaca dapat membaca novel ini dengan cara teliti dan perlahan-lahan sehingga novel lebih mudah dipahami. Selain itu, pembaca juga dapat membaca dengan melafalkan bacaan menggunakan intonasi keras agar isi novel lebih cepat dipahami.

2. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini hanya terbatas mengenai hegemoni kekuasaan yang terdapat dalam novel *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* karya Hamka. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian selanjutnya terhadap novel ini menggunakan pendekatan atau sudut pandang yang lain misalnya menggunakan bidang ilmu Feminis untuk menelaah lebih dalam mengenai hak tokoh Hayati yang termarginalkan. Selain itu dapat pula membahas aspek-aspek lain yang juga menarik untuk ditampilkan, seperti aspek-aspek persamaan kekuasaan dalam novel dengan kadaan masyarakat secara umum, atau bisa membandingkan novel *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* dengan karya-karya Hamka yang lain yang juga membahas permasalahan sosial yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfianto, Dani. 2017. *Dominasi Sosial dalam Novel Max Havelaar Karya Multatuli :Kajian Dominasi Simbolik Pierre Bourdieu*. Surabaya. Universitas Negeri Surabaya.
- Alisjahbana, Sutan Takdir. 1983. *Antropologi Baru Nilai-nilai sebagai Integrasi dalam Pribadi, Masyarakat dan Kebudayaan*. Jakarta: PT. Dian Rakyat.
- Anwar, Ahyar. 2010. *Teori Sosial Sastra*. Jakarta: Penerbit Ombak.
- Anwar, Ahyar. 2012. *Teori Sosial Sastra*. Yogyakarta: Penerbit Ombak (Anggota IKAPI)
- Ariani, Iva. --. "Masyarakat Kebudayaan dan Politik Tahun 25, Nomor 2: 108-116". Jurnal. *Jurnal Filasafat Vol.25. No,1. Februari 2015*.
- Brown, Trent. 2009. "Gramsci and Hegemony". Jurnal. *Links International Journal of Socialist Renewal* . Diakses pada tanggal 4 Juni 2017 pukul 22:17
- Dakhra, Fajriani.-. *Persepsi Mahasiswa Universitas Bakrie (Non Minang) Terhadap Budaya Minang Dalam Film Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*. Skripsi. Jakarta: Universitas Bakrie.
- Damono, Sapardi Djoko.2010. *Sosiologi Sastra Sebuah Pengantar Ringkasan*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Dewan Redaksi Esiklopedia Sastra Indonesia. 1984. *Ensiklopedia Sastra Indonesia*. Bandung: Titian Ilmu
- Faruk. 2010. *Pengantar Sosiologi Sastra: dari Strukturalisme Genetik sampai Post-modernisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faruk. 2013. *Pengantar Sosiologi Sastra (edisi revisi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haryatmoko, Johannes. 2010. *Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hasan, S Hamid. 1988. *Evaluasi Kurikulum*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hendarto, Heru. 1993. *Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci; dalam Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*. Jakarta : Gramedia.

- Junus, Umar. 1986. *Sosiologi Sastra: Persoalan Teori dan Metode*. Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia: Kuala Lumpur.
- Koentjaraningrat. 1989. *Kamus Antropologi*. Bandung: Rhineka Cipta.
- _____. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 1994. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia
- Kurniawan, Heru. 2012. *Teori, Metode, dan Aplikasi Sosiologi Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Naim, Mochtar. 1984. *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Oktara, Dini Rahma. 2017. *Tradisi Malam Bainai pada Acara Perkawinan Adat Padang Pariaman di Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung*. Artikel. Bandar Lampung: FKIP Universitas Lampung.
- Patria, Nezar dan Arief, Andi. 2009. *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Balai Pustaka.
- Pawestri, Shalikhatin. 2015. *Hegemoni Kekuasaan dalam Novel Bibir Merah Karya Achmad Munif*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Pradopo, Rahmat Djoko. 1994. *Prinsip-Prinsip Kritik Sastra Teori dan Penerapannya*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Puspitarini, Hening. 2014. *Hegemoni Mitos Nyai Roro Kidul terhadap Kekuasaan Jawa dalam Novel Sang Nyai Karya Budi Sardjono*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Said, Edward W. 2010. *Orientalisme: Menggugat Hegemoni Barat dan Mendudukan Timur sebagai Subjek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sanday, Peggy Reeves. 1998. *Matriachy as a Sociocultural Form (Paper Presented at The 16th Congres of The Indo-Pasific Prehistory Association. Malaka: Malaysia, 1-7 July, 1998)*. An Old Debate in a New Light.
- Schwenz, Caroline Lee. 2014. "Postcolonial Studies, Hegemony in Gramsci". Jurnal. <https://scholarblogs.emory.edu/postcolonialstudies /2014/06/20 / hegemony -in-gramsci/>
- Simon, Roger. 2004. *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta: INSIST.
- Soekamto, Soejono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Sugiono, Muhadi. 2006. *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suluah. 2004. "Nilai-nilai Demokratis dan Eksistensi Kebudayaan". *Jurnal. Volume 04. Nomor 5. Padang*: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.

Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Widya Sarana: Jakarta.

Wiyatmi. 2013. *Sosiologi Sastra: Teori dan Kajian terhadap Sastra Indonesia*. Kanwa Publisir: -

Jurnal Administrasi Bisnis. Vol.7, No.1. Diakses pada tanggal 21 Juli 2017 pukul 13:35

<http://www.beastudiindonesia.net>. Diakses pada tanggal 2 Agustus pukul 15:01.

<http://www.kabaranah.com>. Diakses pada tanggal 3 Agustus pukul 20:22.

